



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
TAHUN 2020



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
TAHUN 2020**



Diterbitkan Oleh:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
TAHUN 2020**

©2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Editor : Tim Penulis

Kata Pengantar

Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIP).

LAKIP yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka *Good Governance* serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian strategis.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender sepanjang tahun 2020. Selain sebagai laporan, LAKIP ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender dalam rangka mendukung meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang semakin baik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021

Deputy Bidang Kesetaraan Gender



Agustina Erni

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel/Diagram	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Struktur, Organisasi, Tugas dan Fungsi	6
D. Sumber Daya Manusia	17
E. Isu-Isu Strategis	20
BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	24
B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	26
BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Deputy Bidang Kesetaraan Gender	34
B. Capaian Indikator 2020	36
C. Realisasi Anggaran Deputy Kesetaraan Gender	40
D. Hambatan dan Kendala	40
E. Capaian Kinerja Asisten Deputy di Bidang Kesetaraan Gender	42
- <i>Capaian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam</i>	42
- <i>Capaian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi</i>	60
- <i>Capaian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Dikesga</i>	74
- <i>Capaian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan</i>	89
- <i>Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender</i>	112
BAB 4. PENUTUP	122
DAFTAR TABEL/DIAGRAM	
Tabel/Diagram 1.1 Ketimpangan Gender di ASEAN	2
Tabel/Diagram 1.2 Realisasi Anggaran Omspam Deputy Bidang Kesetaraan Gender	6
Tabel/Diagram 1.3 Struktur Organisasi Berdasarkan PerMen PPPA 2015	7
Tabel/Diagram 1.4 Struktur Organisasi Berdasarkan PerMen PPPA 2020	7
Tabel/Diagram 1.5 Rincian Struktur Organisasi Berdasarkan PerMen PPPA 2015	8
Tabel/Diagram 1.6 Rincian Struktur Organisasi Berdasarkan PerMen PPPA 2020	9
Tabel/Diagram 1.7 Struktur Umum Organisasi Deputy Kesetaraan Gender	10
Tabel/Diagram 1.8 Tugas dan Fungsi Deputy Kesetaraan Gender KPPPA	11
Tabel/Diagram 1.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel/Diagram 1.10 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel/Diagram 1.11 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Usia	19
Tabel/Diagram 1.12 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	19

Tabel/Diagram 1.13 Jumlah Keseluruhan Pegawai	20
Tabel/Diagram 1.14 Perkembangan IPM dan IPG 2015 – 2018	21
Tabel/Diagram 1.15 Perkembangan IDG 2015 – 2018	22
Tabel/Diagram 1.16 Pelaksanaan Pelembagaan PUG berdasarkan Kluster APE 2016 dan 2018	23
Tabel/Diagram 2.1 Renja Deputy Bidang Kesetaraan Gender	27
Tabel/Diagram 2.2 Alokasi Anggaran di Setiap Asdep dan Sesdep Deputy Kesetaraan Gender	30
Tabel/Diagram 2.3 Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Polhuhankam	33
Tabel/Diagram 2.4 Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Infralink	33
Tabel/Diagram 2.5 Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Dikesga	33
Tabel/Diagram 2.6 Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	33
Tabel/Diagram 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	34
Tabel/Diagram 2.8 Perubahan PAGU Anggaran Sebelum Sesudah Refocusing dan penambahan Dana Hibah	35
Tabel/Diagram 2.10 Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	31
Tabel/Diagram 2.11 Perbandingan Alokasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Covid-19	32
Tabel/Diagram 3.1 Target pencapaian IPG/IDG 2015 – 2020	36
Tabel/Diagram 3.2 Capaian IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan	37
Tabel/Diagram 3.3 Capaian Deputy Bidang Kesetaraan Gender	40
Tabel/Diagram 3.4 Tabel Pencapaian APE 2018	43
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja 1	24
Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja 2	25

BAB I : PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam Visi dan Misi Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 tercantum bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, sebagaimana tercantum di dalam RPJPN Tahun 2005–2025 tersebut, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya, diskriminasi di bidang gender.

Persoalannya, harus diakui, bahwa kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan masih menyimpan banyak persoalan. Hal ini antara lain ditandai oleh angka indeks pembangunan gender (IPG) yang masih berada dibawah nilai rata-rata dunia serta tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, adalah tantangan, sekaligus menjadi arah pembangunan di bidang pembangunan perempuan, untuk bisa terus dilakukan upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah; termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

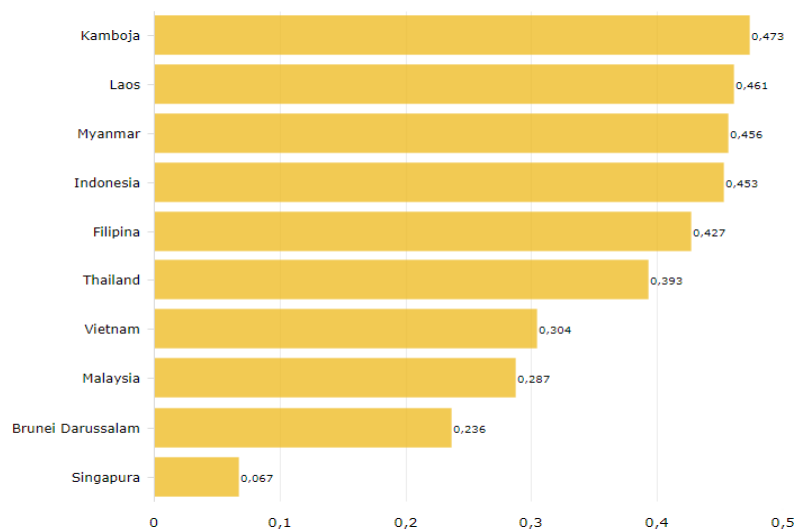
Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, secara maksimal telah berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Namun harus diakui, ketimpangan gender dalam banyak aspek kehidupan, nyatanya masih tetap terjadi. Wacana tentang isu gender sendiri memang sudah menjadi isu yang mendunia. Pada umumnya isu gender yang paling sering dibahas adalah masalah status dan kedudukan perempuan di masyarakat yang masih dinilai subordinat atau marginal.

Persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bukanlah persoalan sederhana dan berdimensi lokal, namun persoalan ini ditemui di seluruh belahan dunia manapun, serta berkaitan erat dengan segala sendi kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan jika

upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, pencapaiannya tetap belum sesuai dengan harapan.

Untuk level negara-negara ASEAN saja, ketimpangan gender Indonesia menempati nomor 4 (empat) tertinggi. Menurut laporan *United Nations Development Programme (UNDP)* tahun 2018, posisi Indonesia berada di bawah Kamboja, Laos dan Myanmar, serta mendapatkan poin di atas rata-rata negara ASEAN dalam hal ketimpangan gender. Kata lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih rendah diantara negara–negara ASEAN.

Tabel/Diagram 1.1 Ketimpangan Gender di ASEAN



Di ASEAN, Index Pembangunan Gender (IPG) Indonesia juga berada di peringkat ke-9 dari sepuluh negara anggota dan merupakan satu dari tiga negara ASEAN yang berada dibawah nilai rata–rata dunia. Jadi, pembangunan gender di Indonesia dari tahun ke tahun memang meningkat, hanya saja pergerakannya lambat.

Lambatnya pergerakan pembangunan gender tersebut, sesungguhnya sama dengan kemajuan menuju kesetaraan gender secara global yang memang juga mulai melambat. Dalam laporan UNDP 2020 *Human Development Perspectives*, dengan laju yang ada sekarang, dunia membutuhkan 257 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender.

Posisi Indonesia sendiri, sebagaimana dilaporkan dalam laporan *Global Gender Gap Report 2020* dari *World Economic Forum*, berada pada posisi ke-85 dari 153 negara di dunia dalam hal kesetaraan gender. Padahal partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap aspek

pembangunan menjadi penentu untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender itu sendiri.

Secara umum, setidaknya terdapat empat bidang kehidupan yang masih mengalami kesenjangan gender alias *gender gap* di Indonesia :

Pertama, *economy empowerment*. Ini adalah bidang, dimana perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini misalnya terlihat dari masih banyaknya perempuan yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal, terutama dari perbankan. Ketika perempuan hendak meminjam dana dari bank, perempuan harus memberikan jaminan, yang biasanya berupa sertifikat aset keuangan. Problemnnya banyak perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya sendiri. Aset keuangan yang dimiliki sebuah keluarga, biasanya menggunakan nama suami atau nama anak laki-laki. Aset modal juga bahkan memerlukan kapasitas, edukasi skill, manajemen dan leadership. Maka ketika tahu pemilik perusahaan adalah perempuan misalnya, bank juga mempertanyakan kapasitasnya, bukan melihat neracanya. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan kaum perempuan.

Kedua, *gender gap* pendidikan. Peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa tahun terakhir memang sudah hampir sama. Akan tetapi gap dalam peluang bersekolah ini tetap memperlihatkan adanya ketidaksetaraan dalam pendidikan yang dialami kaum perempuan. Alasan ekonomi misalnya, kerap menjadikan anak perempuan mendapatkan kesempatan bersekolah yang berbeda dari anak laki-laki. Selain itu, *gender gap* yang terjadi tidak hanya menyangkut persoalan kesempatan bersekolah, melainkan juga ketika anak perempuan memilih jurusan pendidikan. Banyak keluarga yang masih mengkotak-kotakkan jurusan pendidikan, sehingga memberi kesan adanya jurusan yang hanya untuk anak laki-laki, dan ada yang dikhususkan bagi anak perempuan. Jurusan *sciences*, teknologi, dan matematika misalnya, sebagian masyarakat masih ada yang menganggapnya sebagai bidang laki-laki. Padahal di era industri digital saat ini, populasi perempuan di Indonesia telah lebih dari 50%. Jika para perempuan Indonesia tidak diberi kesempatan yang sama untuk masuk ke jurusan-jurusan tersebut, maka hal tersebut akan berpotensi menyulitkan Indonesia untuk bersaing di era industri digital.

Ketiga, kesehatan. Dalam pembangunan kesehatan, isu gender menjadi penting karena gender merupakan determinan kesehatan yang berinteraksi dengan faktor lainnya dalam kesehatan, seperti kelas sosial, ras, dan etnis.

Pendekatan gender dalam kesehatan akan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang berperan penting dalam menentukan status kesehatan dan kesejahteraan individu. Sebagai contoh, kematian ibu di Indonesia masih di angka 305/100.000 kelahiran hidup¹ dan kematian pria akibat tuberkulosis, kecelakaan dan alkohol jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Lensa gender menjadi sudut pandang yang signifikan dalam intervensi kesehatan mengingat saat ini 70 persen tenaga kesehatan di seluruh dunia adalah perempuan (WHO, 2019). WHO sendiri telah mengintegrasikan posisi gender, keadilan dan hak asasi manusia dalam satu kesatuan sebagai cara untuk mencapai kesehatan bagi semua. Oleh sebab itu, berbagai upaya implementasi pengarusutamaan gender melalui proses integrasi, intervensi, dan dialog harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah namun berbagai pihak untuk mencapai kesetaraan gender.

Keempat, gender gap bidang politik. Berdasarkan data *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia, penduduk perempuan berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Namun besaran populasi perempuan tersebut belum terepresentasi dalam bentuk partisipasi politik kaum perempuan. Realitas kesenjangan gender misalnya, masih menunjukkan rendahnya representasi perempuan dalam jabatan politik dan kepala pemerintahan. Peran perempuan di parlemen dan kementerian yang sekarang sudah lebih besarpun tetap saja belum menunjukkan adanya kesetaraan. UU No. 2 Tahun 2008 memang memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Akan tetapi kuota keterwakilan perempuan dalam politik sebesar 30 persen yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut, tetap belum dimanfaatkan secara optimal. Dari

¹ <https://www.kemkes.go.id/index>, diakses Januari 2021.

sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang terpilih dan sudah dilantik, terdapat 118 perempuan². Artinya, kuota keterwakilan perempuan di tingkat nasional baru terisi sekitar 20,52% saja dari keseluruhan jumlah anggota DPR kini. Keterwakilan perempuan dalam politik, meskipun sudah memiliki payung hukum yang jelas dan tegas, rupanya masih terhambat dengan banyak persoalan di luar hukum, yang menyebabkan kuota tersebut gagal dipenuhi.

Dari segi kewilayahan, disparitas pembangunan gender juga terjadi antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peringkat IPG tertinggi yang mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia.

Menghadapi realitas masih timpangnya relasi gender yang disebabkan oleh berbagai macam persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputy Bidang Kesetaraan Gender kemudian menyusun Rencana Kerja yang diantaranya bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, serta meningkatkan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan-kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Lalu sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran, serta kinerja dalam mencapai visi dan misi serta sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Rencana Kerja tahun 2020 tersebut, Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020. Di samping itu, selain sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran serta kinerja, Laporan Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi program-program yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender di tahun-tahun berikutnya.

² Data diolah dari jumlah keanggotaan DPR periode 2019-2024, sebagaimana tercantum di dalam laman <https://www.dpr.go.id/anggota/index>.

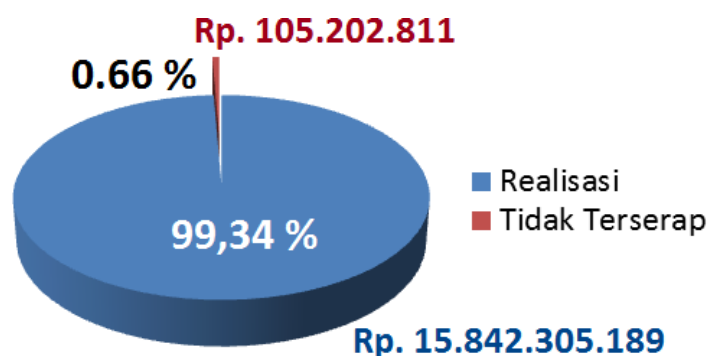
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memberi gambaran keberhasilan, kegagalan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang harus dipertanggungjawabkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020 disusun secara berjenjang, dimulai dari Perjanjian Kinerja Eselon I dengan Menteri PP dan PA, lalu diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Deputy Bidang Kesetaraan Gender. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian PP dan PA tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020.

Sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran, laporan ini menjelaskan tentang serapan anggaran selama tahun berjalan 2020. Namun seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, nilai pagu tersebut mengalami refocusing sehingga berkurang menjadi total Rp. 15.081.696 ditambah dengan dukungan hibah di tahun 2020 maka total anggaran menjadi Rp 15.947.508.000. Dari anggaran Rp 15.947.508.000 ini, jumlah realisasi anggaran adalah Rp. 15.842.305.189 atau sebesar 99,34%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 105.202.811.

Tabel/Diagram 1.2
Realisasi Anggaran Omspam Deputy Bidang Kesetaraan Gender



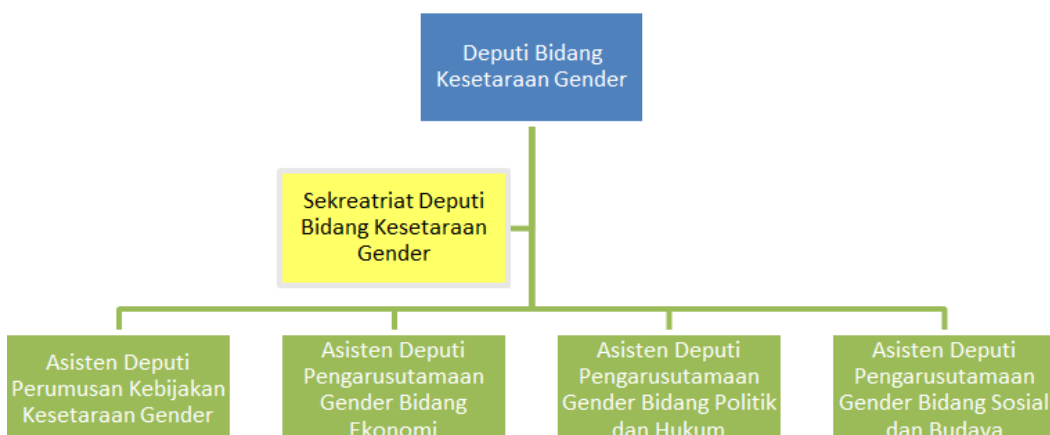
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada perubahan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, maka terjadi pula perubahan dalam hal struktur, tugas dan fungsi dalam organisasi Deputy Kesetaraan Gender. Perbandingan antara kedua peraturan menteri tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Tabel/Diagram 1.3
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Berdasarkan Per-Men PPPA Nomor 11 Tahun 2015



Tabel/Diagram 1.4
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Berdasarkan Per-Men PPPA Nomor 4 Tahun 2020



Susunan organisasi Sekretariat dan masing-masing Asisten Kedepuitan, kemudian terstruktur kembali ke dalam bidang-bidang dan sub-sub bidang tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 bagian-bagian dan sub-sub bagian tersebut terlihat dalam tabel berikut:

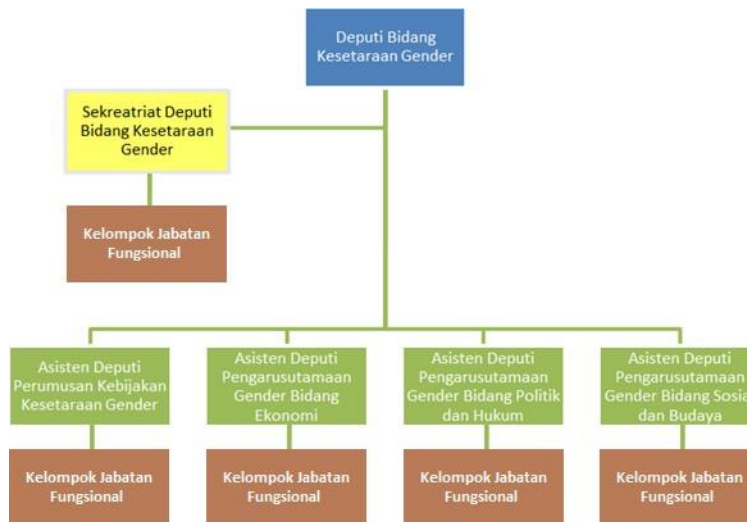
Tabel/Diagram 1.5
Struktur Sekretariat dan Asisten Kedepuitan Bidang Kesetaraan Gender
Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA nomor 11 Tahun 2015

PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 11 TAHUN 2015		
SEKRETARIAT DAN ASISTEN KEDEPUTIAN	STRUKTUR BIDANG/BAGIAN	STRUKTUR SUB-SUB BAGIAN
Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Subbagian Perencanaan
		Subbagian Data dan Pelaporan
	Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Subbagian Hukum dan Kepegawaian
		Subbagian Umum
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Bidang Kesetaraan Gender dalam Politik	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Politik
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Politik
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Hukum	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Hukum
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Hukum
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertahanan dan Keamanan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Industri dan Perdagangan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Industri dan Perdagangan
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	Bidang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pendidikan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pendidikan
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Kesehatan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Kesehatan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Kesehatan
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pembangunan Keluarga
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pembangunan Keluarga
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Infrastruktur
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Lingkungan
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Lingkungan
	Bidang Kesetaraan Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Subbidang Fasilitasi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, struktur bagian-bagian dan sub-sub bagian yang ada hanya dicantumkan sebagai Kelompok Jabatan Fungsional saja.

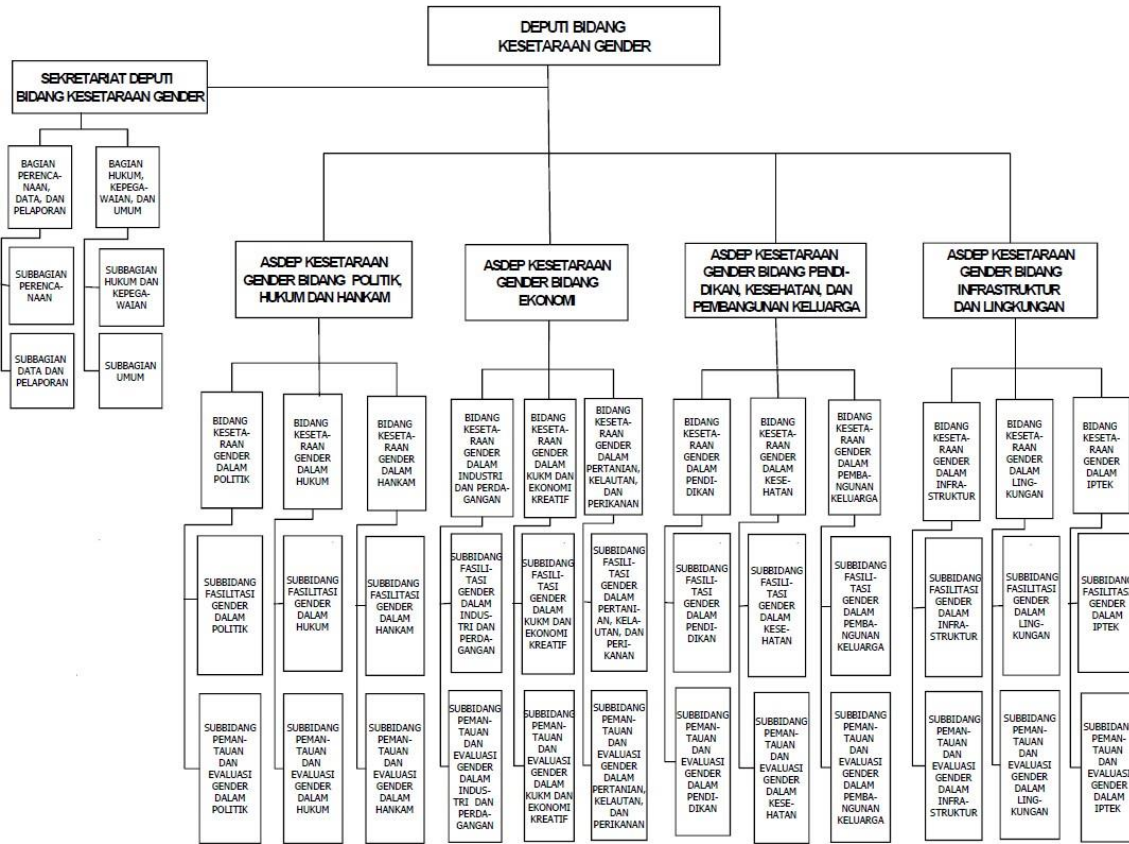
Tabel/Diagram 1.6
Struktur Sekretariat dan Asisten Kedeputan Bidang Kesetaraan Gender.
Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA nomor 4 Tahun 2020



Struktur organisasi Deputi Kesetaraan Gender yang berlangsung saat ini masih menggunakan struktur sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015. Adapun struktur organisasi berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, belum bisa dibentuk. Hal ini disebabkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 baru diberlakukan menjelang pergantian tahun berjalan.

Secara umum, struktur organisasi Deputi Kesetaraan Gender yang berlangsung saat ini dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel/Diagram 1.7
Struktur Organisasi Deputy Kesetaraan Gender



Dalam hal tugas dan fungsi Deputy Bidang Kesetaraan Gender, tidak ada perbedaan antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, kecuali hanya pasal-pasal yang memuatnya serta pengurangan kata dan urutan ayat, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel/Diagram 1.8: Tugas dan Fungsi Deputy Kesetaraan Gender KPPPA
Berdasarkan Per-Men PPPA Nomor 11 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2020**

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER TUGAS DAN FUNGSI	
PERMEN PPPA NOMOR 11/2015	PERMEN PPPA NOMOR 4/2020
Pasal 66 - 68	Pasal 25 - 27
<p>KEDUDUKAN: Deputi Bidang Kesetaraan Gender berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh Deputi.</p>	<p>KEDUDUKAN: Deputi Bidang Kesetaraan Gender merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh Deputi.</p>
<p>TUGAS: Menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.</p>	<p>TUGAS : Menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.</p>
<p>FUNGSI : Menyelenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender d. Penyusunan data gender bidang pembangunan e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender f. emantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 	<p>FUNGSI : Menyelenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender e. Penyusunan data gender f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender dibantu oleh para Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebagai Pejabat Eselon II.

Tugas dan Fungsi dari masing-masing Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 akan dijabarkan dalam deskripsi berikut ini:

1. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA

a. Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender

Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.
3. Pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.
4. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender.
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender

b. Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

c. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang ekonomi.
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang ekonomi.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang ekonomi.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

d. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

e. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.

2. Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA

a. Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran serta pengelolaan risiko Deputy.
2. Pengelolaan data dan informasi.
3. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi Deputy.
5. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender

Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta evaluasi kebijakan di bidang kesetaraan gender.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender.
2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender.
3. Penyiapan penyusunan data gender
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang kesetaraan gender.

c. Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi.
2. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang ekonomi.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi.

d. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum.
2. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum.

e. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya.

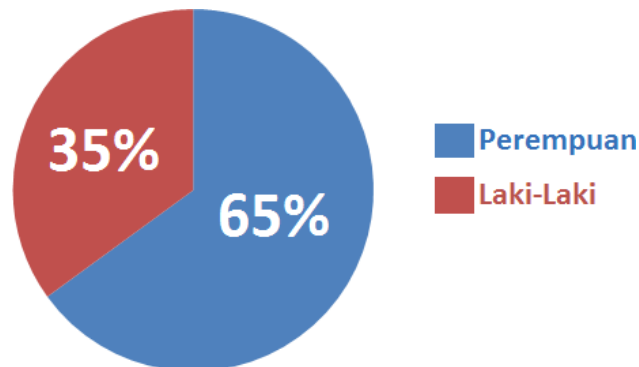
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang sosial dan budaya.
2. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang sosial dan budaya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Deputi Kesetaraan Gender didukung oleh 65 pegawai dengan rincian 52 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 Non ASN dengan berbagai latar belakang berbagai disiplin keilmuan.³

Tabel/Diagram 1.9:
Jumlah Pegawai Deputi Kesetaraan Gender Berdasarkan Jenis Kelamin



Bila dirinci per Sekretariat dan Asisten Kedeputian, maka gambaran jumlah pegawai di Deputi Kesetaraan Gender adalah :

Tabel/Diagram 1.10:
Rincian Jumlah Pegawai Deputi Kesetaraan Gender Berdasarkan Jenis Kelamin

SEKRETARIAT /ASISTEN DEPUTI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	10	6	16
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	9	2	11
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	7	5	12
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	8	3	11
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	8	7	15
JUMLAH KESELURUHAN	42	23	65

Sedangkan rincian per Sekretariat dan Asisten Kedeputian berdasarkan usia dan status kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut :

³ Data Deputi Bidang Kesetaraan Gender per November 2020

Tabel/Diagram 1.11:
Rincian Jumlah Pegawai Deputy Kesetaraan Gender Berdasarkan Usia

SATUAN KERJA	USIA (TAHUN)				STATUS	
	20 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	ASN	NON ASN
Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender	6	6	3	1	9	7
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	4	2	1	4	11	-
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	5	3	3	1	9	3
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	7	1	2	1	8	3
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	7	4	2	2	15	-
JUMLAH KESELURUHAN	29	16	11	9	52	13

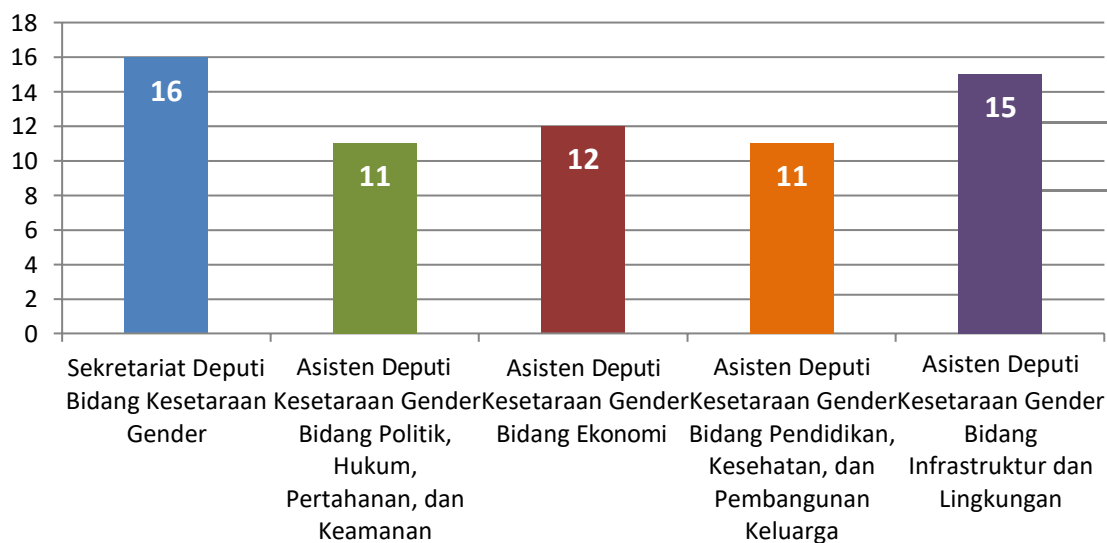
Sementara bila dilihat dari segi pendidikan, sumber daya manusia di Deputy Kesetaraan Gender dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel/Diagram 1.12:
Rincian Jumlah Pegawai Deputy Kesetaraan Gender Berdasarkan Pendidikan

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				
	SMA	D3	S1	S2	S3
Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender	6		9	1	
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan			8	2	1
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	1	1	8	2	
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga			9	2	
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan			8	6	1
JUMLAH KESELURUHAN	7	1	42	13	2

Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia di Deputy Kesetaraan Gender per Sekretariat dan Asisten Deputy adalah:

Tabel/Diagram 1.13:
Jumlah Keseluruhan Pegawai Deputy Kesetaraan Gender Berdasarkan Satuan Kerja



E. ISU-ISU STRATEGIS

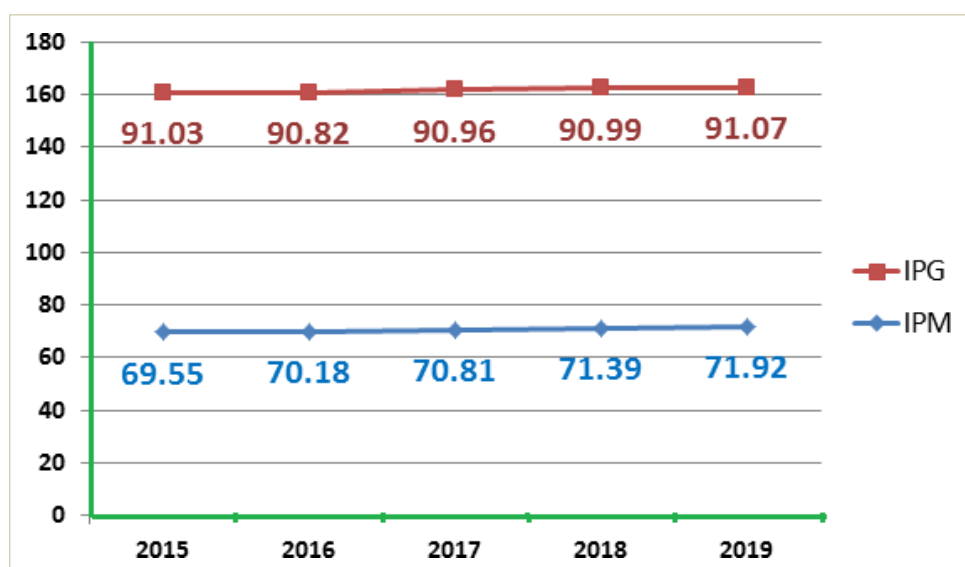
Gender merupakan isu yang bersifat multi dimensi meliputi hampir semua aspek dan permasalahan dari berbagai sisi, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan. Gender juga menjadi *point* dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Persoalan gender tercantum sebagai tujuan ke-5, yakni : *“mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”*, dari 17 tujuan SDGs.

Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan. PUG mendorong kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan serta aspirasi perempuan dan laki-laki, ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

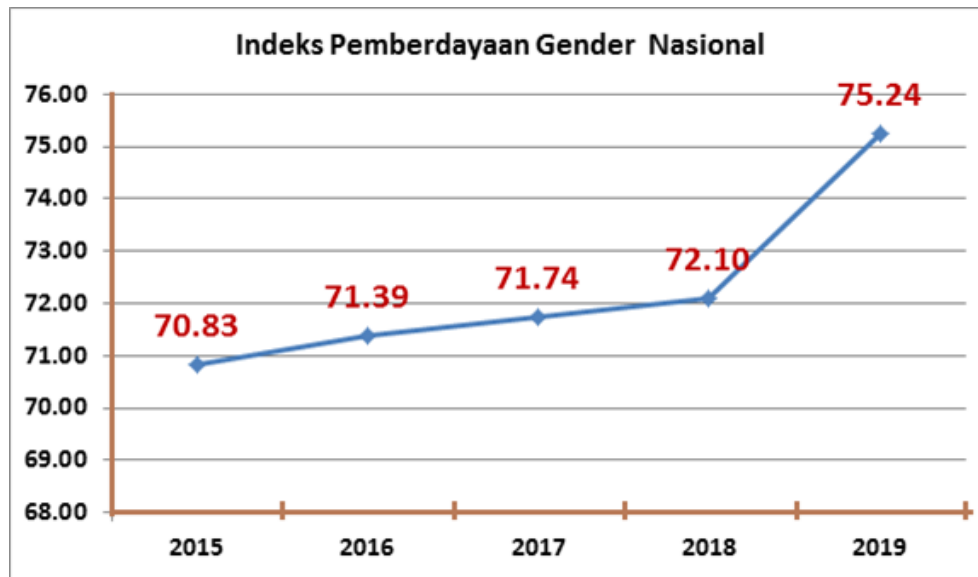
Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut ada beberapa indeks yang digunakan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja; kegiatan politik melalui indikator keterlibatan perempuan di parlemen; serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi.

Secara umum kesetaraan gender di Indonesia semakin membaik, atau dengan kata lain, kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari terus membaiknya nilai IPM, IPG dan IDG dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91.03. Meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan menjadi 90,82 namun pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat hingga mencapai angka 91,07 pada tahun 2019. Begitu juga dengan IDG yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 IDG Indonesia mengalami peningkatan dari 70,83 (2015) menjadi 71.39 (2016), lalu 71,74 (2017) dan 72,10 (2018) untuk kemudian mencapai 75,24 (2019).

Tabel/Diagram 1.14:
Perkembangan IPM dan IPG 2015 – 2019



Tabel/Diagram 1.15 :
Perkembangan IDG 2015 – 2019



Secara khusus, meningkatnya pembangunan yang responsif gender ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang diukur melalui status kesehatan ibu; angka harapan hidup laki-laki dan perempuan; rasio angka melek huruf laki-laki dan perempuan; rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan; sumbangan pendapatan penduduk di sektor non pertanian; tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja; serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif dan tenaga profesional.

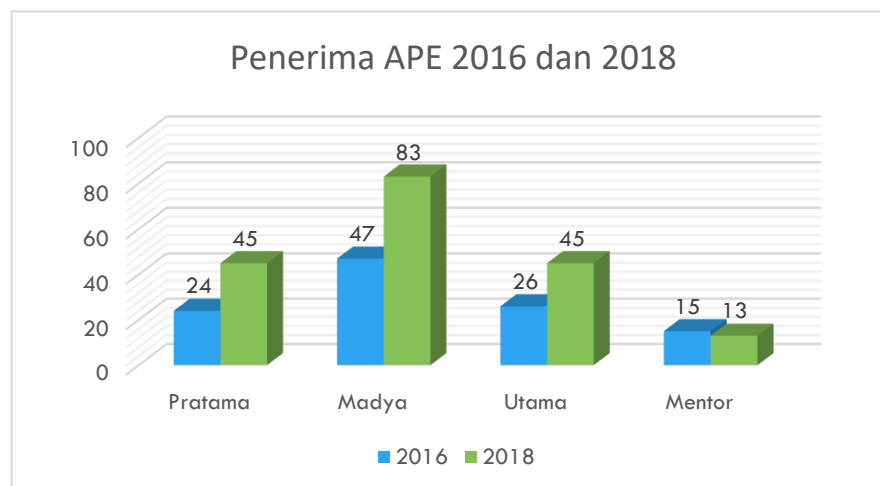
Sedangkan peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diukur melalui peningkatan peraturan perundang-undangan dan berbagai piranti kebijakan ditingkat nasional maupun daerah yang responsif gender; ketersediaan data terpilah; meningkatnya sumber daya manusia terlatih; terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; menguatnya kelompok kerja gender di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sekaligus meningkatnya peran masyarakat yang mendukung berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG.

Membaiknya pelembagaan PUG di K/L dan pemerintah daerah juga dapat diukur dari hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG itu sendiri, yaitu melalui apresiasi/penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh pemerintah kepada K/L, provinsi dan

kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender secara sistematis dan berkelanjutan. Pemberian penghargaan APE dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dengan menggunakan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (APE) menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan pelembagaan PUG, baik di K/L maupun pemerintah daerah, dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah K/L dan daerah penerima APE adalah 113. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 189, sebagaimana terlihat dalam infografis di bawah ini :

Tabel/Diagram 1.16:
Pelaksanaan Pelembagaan PUG berdasarkan Kluster APE 2016 dan 2018



Untuk APE tahun 2020, penilaian masih dalam proses verifikasi. Hal ini disebabkan adanya kendala situasi pandemik global COVID-19 yang turut melanda Indonesia. Selain kendala yang bersifat pusat, situasi dan kondisi di daerah juga mengalami hambatan dan tantangan yang hampir sama, dimana fokus pemerintah daerah lebih banyak dikonsentrasikan bagi upaya penyelesaian pandemik COVID-19.

Hal lain yang menjadi isu dalam bidang kesetaraan gender adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi; peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di K/L dan Pemda; meningkatkan pemahaman dan komitmen K/L dan Pemda tentang PUG. Selain itu, isu Kelembagaan PUG di K/L dan Pemda juga belum berjalan secara optimal sehingga perlu dilakukan *review* dan

harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG; penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG ditingkat pusat dan daerah; peningkatan kapasitas SDM K/L dan OPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda; penguatan sistem pemanfaatan data terpilah; dan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG-PPRG.

Menghadapi isu-isu tersebut diatas, yang tetap menjadi fokus perhatian sejak di tetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2001 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Kesetaraan Gender menetapkan isu-isu strategis yang akan diintervensi sepanjang tahun 2020. Isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Percepatan pengarusutamaan gender di dalam program dan kegiatan di K/L dan Pemda;
2. Model pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
3. Model peningkatan partisipasi dan peran pemimpin perempuan perdesaan;
4. Model perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dalam program dan kegiatan pencegahan *stunting*;
5. Model perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender Desa;
6. Model Sekolah Perempuan utk pemberdayaan perempuan desa;
7. Model Pengarusutamaan gender dalam bencana.

Tantangan terbesar yang dihadapi kini oleh Deputi Kesetaraan gender dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut tentu saja berkait dengan situasi pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia. Sejak mewabah pada bulan Maret 2020 hingga berakhirnya tahun 2020, pandemi nyatanya masih belum mereda. Moda kerja dan situasi yang berubah sebagai dampak pandemik Covid-19 telah memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam pencapaian isu strategis. Situasi ini juga tentu sangat mempengaruhi upaya percepatan implementasi PUG. Pendampingan intensif baik di K/L dan pemda menjadi minimal, karena media yang digunakan adalah pertemuan *online*. Pendampingan dengan model semacam ini tentu saja dapat mengurangi beberapa konteks koordinasi sekaligus transfer pengetahuan, sehingga beberapa isu strategis yang sudah ditargetkan menjadi terkendala dari sisi kualitas pada tingkat K/L maupun Pemda.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pemerataan pembangunan perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki diukur dari seberapa besar mereka memiliki hak untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang adil dan setara, disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan, dan permasalahan kondisi masing-masing. Pemerintah Indonesia, karenanya, berupaya menguatkan komitmen dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden ini mengatur seluruh proses perencanaan yang berkeadilan serta memberikan arah bagaimana kesetaraan dapat diwujudkan melalui proses perencanaan yang terintegrasi dan terpadu dengan seluruh kebijakan maupun program kegiatan di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Upaya tersebut selaras dengan **tujuan** Kementerian PPPA yang diamanatkan melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, berdasarkan Renstra Kemen PPPA yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2020 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020, yaitu: Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan”. Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, memiliki Sasaran Program sebagai berikut SP. 1.1. Meningkatnya

kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pelebagaan PUG di K/L dan pemda.

Indikator kinerja diukur melalui:

- a) Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal “cukup”.
- b) Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal “baik”.

1. SP.1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Indikator kinerja diukur melalui :

- a) Persentase perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan;
- b) Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro;
- c) Persentase perempuan korban kekerasan yang menjadi pelaku usaha ultra mikro;
- d) Persentase perempuan rentan yang berdaya secara sosial;
- e) Persentase kegiatan penurunan *stunting* yang responsif gender;
- f) Presentase provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana yang responsif gender; dan
- g) Persentase pemerintah daerah yang memiliki perempuan sebagai agen perubahan lingkungan yang responsif gender.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Rencana Kerja (Renja) memuat tentang Program, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan, guna mendukung pencapaian tujuan dari Deputi Kesetaraan Gender. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, lokasi dan pagu indikatif sebagai pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Beberapa perubahan kebijakan, antara lain dengan ditetapkannya RPJMN 2020 – 2024, Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, serta beberapa perubahan kebijakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2020 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2020 – 2024 masih dalam proses revisi. Namun program dan kegiatan di lingkup satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender tetap menggunakan Renja 2020 yang telah disusun di tahun 2019, demikian juga Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di bulan Januari 2020 dan tidak dilakukan revisi, namun kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Kemen PPPA 2020 – 2024.

Berikut gambaran pelaksanaan Renja Deputy Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020 dapat dilihat pada matrik dibawah ini:

Tabel/Diagram 2.1:
Renja Deputy Bidang Kesetaraan Gender

Deputi Bidang Kesetaraan Gender		
Tujuan: Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan		
Berdasarkan Permen PPPA No. 2 Tahun 2020 tentang Renstra Kemen PPPA 2020 - 2024		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2020
SS.1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,21
	b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24
	c. TPAK Perempuan	52,51
	d. Indeks PUG Nasional	64,16
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020
S.P.1.1. Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemda	a. Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal CUKUP	38,10
	b. Persentase Provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	64,71
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020
SP.1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	a. Persentase perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan	-
	b. Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro	12,33
	c. Persentase perempuan korban kekerasan yg menjadi pelaku usaha ultra mikro	2
	d. Persentase Perempuan Rentan yang berdaya secara sosial	5%
	e. Persentase Kegiatan Penurunan Stunting yang responsive gender	49%
	f. Persentase prov/kab/kota yg memiliki kebijakan mitigasi dan	6%

		adaptasi bencana yg responsif gender	
		g. Persentase Pemda yg Memiliki Perempuan sbg Agen Perubahan Lingkungan yang Responsif Gender	9%
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renja 2020	Target PK 2020
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam	a. Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5 K/L	5 K/L
	b. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	4 Prov	4 Prov
	c. Percepatan pelaksanaan PUG	-	5 prov
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa prov serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	1. Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	8 K/L	8 K/L
	2. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	4 Prov	4 Prov
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	1. Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam pendampingan kewirausahaan agi perempuan penyintas kekerasan	-	5 prov
	2. Persentase pendampinf Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang meningkat kapasitasnya tentang PPPA	-	30 %
	3. Jumlah pendamping (Account Officer) PNM Mekaar yang	-	5000 orang

	meningkatkan kapasitasnya tentang PPPA		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang infraling dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas dan peran perempuan tentang PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	a. Jumlah K/L bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRGnya	2 K/L	2 K/L
	b. Jumlah Provinsi yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRGnya	9 Prov	9 Prov
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	a. K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	5 K/L	5 K/L
	b. Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	5 Prov	5 Prov
	c. Percepatan Pelaksanaan PUG	12 prov	4 prov
Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi Bidang KG	a. Presentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	100 %	100 %
	b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang Kesetaraan Gender	100 %	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja tahun 2020 disusun sebelum Permen PPPA No. 2 Tahun 2020 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 ditetapkan, namun penyusunannya mengacu pada

RPJMN 2020 – 2024, dan beberapa kegiatan lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender masuk dalam prioritas nasional.

Setelah Renstra Kemen PPPA ditetapkan pada bulan Mei 2020, Perjanjian Kinerja tetap menggunakan yang telah ditandatangani di bulan Januari 2020 tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan di lingkup unit Eselon 2 menyesuaikan dengan Renstra Kemen PPPA 2020 – 2024.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Deputy Bidang Kesetaraan Gender mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 48.200.000.000 pada tahun 2020. Anggaran ini tersebar di lima kegiatan yang berada langsung di bawah Deputy Bidang Kesetaraan Gender melalui empat Asisten Deputy dan satu Sekretariat Deputy Sasaran program, arah kebijakan dan strategi serta alokasi anggaran, selanjutnya dirumuskan ke dalam Indikator kinerja terkait tugas dan fungsi, untuk berikutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 antara Deputy Bidang Kesetaraan Gender dengan empat Asisten deputy dan satu Sekretariat Deputy dalam rangka mendukung pencapaian target dari Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diturunkan kepada unit eselon II dibawahnya.


Tabel/Diagram 2.2 :
Alokasi Anggaran di Setiap Asdep dan Sesdep Deputy Kesetaraan Gender



Gambar 2.1 dan Gambar 2,2 di bawah ini merupakan bentuk Perjanjian Kinerja antara Deputy Bidang Kesetaraan Gender dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak tahun 2020. Sedangkan Tabel/diagram 2.6 s.d 2.10 merupakan Perjanjian Kinerja setiap Eselon II di lingkup Deputi Bidang Kesetaraan Gender.

Gambar 2.1 dan Gambar 2,2
Perjanjian Kinerja antara Deputi Bidang Kesetaraan Gender dengan Menteri PPPA tahun 2020



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Erni
Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

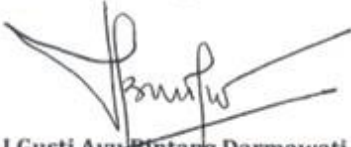
Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kesetaraan Gender


Agustina Erni



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender melalui pelaksanaan strategi PUG melalui PPRG	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.00
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72.44
2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Persentase perempuan penyintas kekerasan yang mendapat peningkatan kapasitas kewirausahaan	30 persen

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam | Rp. 3.000.000.000,- |
| 2. Pengarus Utamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan | Rp. 2.700.000.000,- |
| 3. Pengarus Utamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga | Rp. 11.500.000.000,- |
| 4. Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi | Rp. 23.500.000.000,- |
| 5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender | Rp. 7.500.000.000,- |

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Kesetaraan Gender


Agustina Erni

Tabel/Diagram 2.3:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam	a. Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5 K/L
	b. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	4 Prov
	c. Percepatan Pelaksanaan PUG	5 Prov

Tabel/Diagram 2.4:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUG Di K/L Bidang Infraling Dan Beberapa Prov/Kab/Kota Serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran Perempuan Tentang PUG Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	a. Jumlah K/L Bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang Meningkatkan Kapasitas PUG/PPRG nya	2 K/L
	b. Jumlah Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitas PUG/PPRG nya	9 Prov

Tabel/Diagram 2.5:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangua Keluarga

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	a. K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	5 K/L
	b. Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	5 Prov
	c. Percepatan Pelaksanaan PUG	12 Prov

Tabel/Diagram 2.6:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa prov serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	a. Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	8 K/L
	b. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	4 Prov
Meningkatnya Pemberdayaan dalam Kewirausahaan	a. Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam pendampingan kewirausahaan bagi perempuan penyintas kekerasan	5 Prov

	b. Persentase pendamping pusat layanan usaha terpadu (PLUT) yang meningkat kapasitasnya tentang PPPA	30 Persen
	c. Jumlah pendamping (Account officer) PNM Mekar yang meningkat kapasitasnya tentang PPPA	5000 orang

Tabel/Diagram 2.7:
Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi Bidang KG	a. Presentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	100 %
	b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang Kesetaraan Gender	100 %

Seiring dengan situasi pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia per Maret 2020, maka terjadi perubahan dalam metode pelaksanaan program dan implementasi kegiatan-kegiatan pemerintah, tidak terkecuali di Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA. Kebijakan pemerintah untuk prioritas program dan kegiatan mengalami *refocusing*. Karenanya, alokasi pagu anggaran juga mengalami perubahan dari penetapan awal, sesuai perubahan program dan kegiatan yang terjadi. Perubahan total jumlah anggaran tersebut disesuaikan pula dengan perubahan pencapaian indikator kinerja di asisten ke deputian.

Pagu awal anggaran Deputi di Deputi Bidang Kesetaraan Gender ditetapkan sebesar Rp. 48.200.000.000. Adanya kebijakan *refocusing* anggaran menyebabkan perubahan pagu anggaran Deputi Bidang Kesetaraan Gender menjadi sebesar Rp. 15.947.508.000.

Tabel di bawah ini menggambarkan perubahan anggaran dari setiap asisten ke deputian dan sekretariat deputi setelah *refocusing* dan penambahan anggaran hibah :

Tabel/Diagram 2.8:
Perubahan PAGU Anggaran Sebelum Sesudah Refocusing dan penambahan Dana Hibah

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING	PAGU REFOCUSING + HIBAH
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum Dan Hankam	Rp.3.000.000.000	Rp. 2.228.515.000	Rp. 2.228.515.000
Assisten Deputi Kesetaraan Gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Rp. 2.700.000.000	Rp. 1.670.783.000	Rp. 1.670.783.000
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Rp. 11.500.000.000	Rp. 2.911.305.000	Rp. 3.777.117.000
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Rp. 23.500.000.000	Rp. 2.304.904.000	Rp. 2.304.904.000
Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Rp. 7.500.000.000	Rp. 5.966.189.000	Rp. 5.966.189.000
JUMLAH	Rp. 48.200.000.000	Rp. 15.081.696.000	Rp. 15.947.508.000

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender (Deputi KG) 2020 dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian atau target pada setiap indikator yang telah disusun sebelumnya dalam rencana kerja. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tingkat pencapaian pada tiap-tiap indikator.

Strategi pencapaian kesetaraan gender adalah melalui pengintegrasian gender dalam berbagai bidang pembangun serta percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan program-program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, seperti Industri Rumahan, Sekolah Perempuan dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2020.

Dua indikator kinerja Deputi Bidang Kesetaraan gender diimplementasikan melalui dua sasaran strategis, seperti terlihat dalam diagram berikut:

1. Meningkatnya capaian pembangunan gender, diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Meningkatnya capaian pemberdayaan gender, diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Maka capaian ditahun 2019-2020 dapat terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel/Grafik 3.1
Target Pencapaian IPG dan IDG (2015 – 2020)

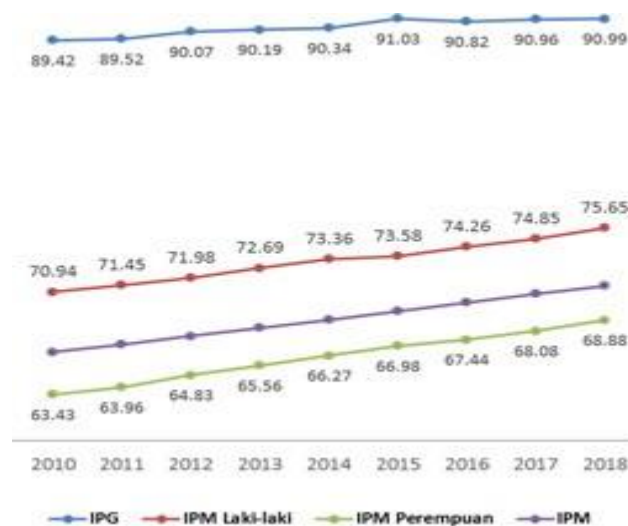
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TARGET					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	91.03	91.25	91.50	92.00	92.00	91.21
	Indeks pembangunan Gender (IPG) Nasional		91.03	90.82	90,96	90,99	91.07	

Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.63	70.83	70.98	71.13	72.44	72.44	73.24
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional		70.83	71.39	71.74	72.10	75.24	

Dalam Laporan Kinerja 2020 ini, indikator kinerja utama yang digunakan memang masih mengacu pada target indikator pada tahun 2019. Tabel di atas memperlihatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun harus diakui juga bila pergerakannya berjalan lambat. IPG Indonesia pada 2018 misalnya, naik 0,03 poin persentase dari tahun 2017, sementara pada tahun 2019 peningkatannya adalah 0,08 poin persentase dibandingkan tahun 2018.

Bagaimanapun hal ini tetap menunjukkan adanya tren perbaikan dalam Pembangunan Manusia Indonesia dalam perspektif kesetaraan gender, meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa IPM laki-laki tetap lebih tinggi dibandingkan dengan IPM perempuan. Grafik di bawah, memperlihatkan bahwa IPM perempuan di tahun 2018 masih berada di angka 68.88, sementara IPM laki-laki berada pada angka 75.65.

Tabel/Grafik 3.2
Capaian IPM Laki-laki dan IPM Perempuan



Angka ini memperlihatkan bahwa kualitas pembangunan perempuan di Indonesia walaupun selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, namun masih tetap dibawah kualitas pembangunan laki-laki di Indonesia.

Diantara yang mempengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di sini adalah dalam hal ekonomi yang salah satunya adalah pengeluaran perkapita, dimana perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2018 saja, pengeluaran perkapita laki-laki per tahun adalah Rp. 15.546.000, sedangkan perempuan Rp. 9.042.000. Pada tahun 2019, angkanyapun tidak terlalu berbeda, yaitu Rp. 15.866.000 untuk laki-laki dan Rp. 9.244.000 untuk perempuan. Pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki tersebut memperlihatkan *gap* yang cukup besar dimana selisih pengeluaran perkapita laki-laki hampir 58 persen lebih banyak dari pengeluaran perkapita perempuan.

Target IPG 2020 mengalami penurunan di level 91.21 selisih 0.14 poin dari IPG nasional, tetapi yang mengembirakan IDG 2020 telah melampaui target 73.24 dimana IDG Indonesia mencapai level 75.24 penyumbang meningkatnya IDG dimana 17 provinsi mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun beberapa provinsi bahkan mengalami penurunan IDG, yang menarik untuk peningkatan IDG berada di daerah Kalimantan yang pada tahun sebelumnya nilainya tidak terlalu tinggi. Untuk IPG 18 provinsi mengalami peningkatan yang sangat kecil tetapi 16 daerah mengalami penurunan IPG, sehingga angka IPG 2020 masih berada di level 91,07.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia, yang mengindikasikan perbaikan dan berada di level 75,24 dari skala 0-100 pada 2019. IDG tersebut naik 3,14 poin persentase dari tahun sebelumnya. Membaiknya IDG tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan. IDG merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Hanya empat (4) provinsi memiliki capaian IDG provinsi berada di atas angka nasional tetapi provinsi lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih berada di bawah capaian nasional

Gambaran ini memperlihatkan ada peningkatan pemberdayaan perempuan yang dilihat dari tingkat keterwakilan Perempuan Hasil Pemilu 2019 terdapat 120 anggota DPR perempuan (20,87%) mengalami peningkatan dari hasil Pemilu 2014 sebanyak 97 perempuan (17,3%). Walaupun tantangan yang masih dihadapi perempuan dimana⁴:

⁴ Sumber Policy Brief “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender” Bappenas, KPPPA dan UNFPA

2. Keterwakilan perempuan meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan yang bisa dilihat dari kualitas kebijakan yang dihasilkan.
3. Kebijakan, praktek dan kelembagaan partai politik yang masih bias gender dan membatasi partisipasi kepemimpinan perempuan, yang mencakup sistem rekrutmen caleg legislatif, dan kecenderungan di mana caleg perempuan masih dijadikan formalitas untuk hanya sebagai pemenuhan kuota keterwakilan.
4. Belum kuatnya dukungan para pihak dalam upaya menguatkan representasi perempuan di parpol dan legislatif. Keterwakilan perempuan terkendala dengan perspektif yang bias gender serta dukungan sosial dan keyakinan atas kepemimpinan perempuan. Hal ini menguatkan pandangan yang sudah mapan bahwa dunia politik memang dunia maskulin.
5. Karena rendahnya keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan menyebabkan perempuan tidak signifikan melakukan perubahan dalam mendorong kebijakan dan regulasi yang responsif gender.

Strategi integrasi pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang KG merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. Selain sebagai focal point dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pengarusutamaan gender lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan PUG, melalui pembentukan model-model pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Mainstreaming Pengarusutamaan Gender lintas K/L dan pemda antara lain melalui program antara lain pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan partisipasi dan peran pemimpin perempuan perdesaan, model perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dalam program dan kegiatan pencegahan stunting, perencanaan dan penganggaran responsif gender Desa, sekolah perempuan untuk pemberdayaan perempuan desa, dan pengarusutamaan gender dalam bencana yang saat ini situasinya sangat mendukung dengan tingginya angka kejadian bencana di Indonesia.

Hal-hal lain yang harus tetap menjadi perhatian adalah dibutuhkannya inovasi dan pendekatan yang lebih mendekatkan situasi ditingkat nasional dan daerah dalam upaya mengimplementasikan pelembagaan PUG dalam aspek 7 prasyarat (Komitmen, Kebijakan,

Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Data dan Sistem Informasi, Metode dan Alat Analisis, serta Jejaring dan Peran Serta Masyarakat) dan memungkinkan untuk mendukung dengan tools dan panduan yang lebih memudahkan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk benar-benar menjadikan PUG sebagai strategi dalam menjawab sekaligus meningkatkan IPG dan IDG perempuan Indonesia.

B. CAPAIAN INDIKATOR 2020

1. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan Indeks Pemberdayaan Gender yang mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. IPG Indonesia pada 2018 berada di level 90,99, naik menjadi 91,07 ditahun 2019. Dan IDG Indonesia pada tahun 2018 adalah 72.10 meningkat tinggi menjadi 75,25 melampau dari target yang ditetapkan oleh deputi Kesetaraan gender pada tahun 2019 di angka 72.44.

2. INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

Situasi pandemic covid-19 yang mewajibkan ditegakkannya protokol kesehatan, menyebabkan terjadi perubahan-perubahan dalam metode pelaksanaan kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, seminar, dan lain-lain, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi secara daring dengan mengedapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pertemuan-pertemuan secara virtual. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan ini menyebabkan semakin banyak target sasaran yang dapat dijangkau, sehigga berdampak pada capaian indikator sasaran kegiatan di setiap keasdepan.

Tabel/Diagram 3.3
Capaian Deputi Bidang Kesetaraan Gender

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Bidang Polhuhankam			
a. Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5 K/L	15 K/L	300%

b. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	4 Prov	4 Prov	100%
c. Percepatan Pelaksanaan PUG	5 Provi	5 Prov	100%
Bidang Ekonomi			
d. Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	8 K/L	11 K/L	137%
e. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	4 Prov	11Prov	275%
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan			
f. Jumlah K/L bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	2 K/L	14 K/L	700%
g. Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	8 Prov	8 Prov	100%
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga			
h. K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	5 K/L	10 K/L	200%
i. Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	5 Prov	9 Prov	180%
j. Percepatan Pelaksanaan PUG	12 Prov	12 Prov	100%
Sekretariat Deputi			
k. Presentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	100 %	100%	100%
l. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang Kesetaraan Gender	100 %	100%	100%

Dari matrik di atas terlihat, semua indikator kinerja kegiatan, yang menjadi salah satu ukuran pencapaian kinerja Asdep Deputi KG semuanya tercapai, melebihi target. Bahkan ada sejumlah indikator yang realisasi pencapaiannya di atas 100 persen yaitu:

- Di bidang infraling, jumlah K/L bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya, pencapaiannya sebesar 700%
- Di bidang ekonomi, jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya, pencapaiannya sebesar 275%
- Di bidang polhuhankam, jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya, pencapaiannya sebesar 300%.

- Di bidang Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG, pencapaiannya sebesar 200%.
- Di bidang ekonomi jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya, pencapaiannya sebesar 137,5%.

2. INDIKATOR EVALUASI PUG

Pencapaian pelembagaan PUG di K/L dan Provinsi/Kabupaten/Kota diukur dengan perolehan indeks PUG K/L dan Provinsi/Kabupaten Kota. Indeks PUG adalah ukuran statistik yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada suatu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi serta Kabupaten/Kota). Indeks PUG mulai digunakan di tahun 2020 ini untuk menentukan kriteria capaian pelembagaan pug di K/L dan pemda. Kegunaan indeks PUG adalah:

- 1) Menentukan Menentukan peringkat KL, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang keberhasilan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- 2) Bahan advokasi kepada Pimpinan KL dan Pempinan Daerah agar terpacu dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam program Pembangunan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Menentukan focus perhatian dalam pendampingan atau fasilitasi KPP PA kepada KL dan Pemerinta Provinsi.
- 4) Bahan masukan untuk penyusunan program kerja KPPPA.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan kepada K/L dan pemda yang telah memenuhi nilai indeks pug sebagai berikut:

NO	NILAI INDEKS PUG	KATEGORI PENGHARGAAN APE
1.	50,25 – 63,74	PRATAMA
2.	63,75 – 77,24	MADYA
3.	77,25 – 90,74	UTAMA
4.	≥ 90,75	MENTOR

Pemberian penghargaan APE dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Pada 2018 proses penilaian APE dikoordinir langsung di bawah Biro Perencanaan dan Data KPPPA. Pada tahun 2020 pelaksanaan Penilaian APE dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender dengan

merubah beberapa pertanyaan di dalam. Akan tetapi dalam prosesnya, situasi pandemi covid-19 ternyata memberi tantangan besar dalam proses verifikasi di K/L maupun daerah. Di sisi lain daerah juga mengalami refocusing anggaran dan kegiatan. Meskipun demikian, verifikasi APE 2020 akan terus dilaksanakan di awal tahun 2021.

Rincian K/L/Prov/Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel/Diagram 3.4
Tabel Pencapaian APE 2018

No	Kategori	K/L	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Penghargaan Utama	1	-	-	1
2	Mentor	6	4	4	14
3	Utama	1	8	36	45
4	Madya	1	8	75	84
5	Pratama	-	2	44	42
	Total	9	22	156	190

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan PUG dengan mengisi penilaian mandiri secara online di tahun 2020 melalui <https://evaluasipug.kemenpppa.go.id/> dan akan dilakukan verifikasi dan pemberian penghargaan APE di tahun 2021 adalah :

NO	K/L DAN PEMDA	JUMLAH
1.	Kementerian/Lembaga	12
2.	Provinsi	33
3.	Kabupaten/Kota	280

Jumlah K/L, kabupaten/kota yang mengisi penilaian mandiri mengalami penurunan dibandingkan 2018. Tetapi untuk provinsi mengalami peningkatan seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel Perbandingan K/L dan Pemda yang mengisi Aplikasi pada Pelaksanaan PUG 2018

	JUMLAH	ISI FORM APE 2018	ISI FORM APE 2020
K/L	60	37	12
Provinsi	34	32	33
Kab/Kota	515	368	280

Penurunan terbesar terjadi pada K/L yang mengisi form APE. Jika pada 2018 ada 37 K/L yang mengisi form APE, pada 2020 hanya 12 atau menurun 68%. Untuk Kab/kota yang mengisi form APE pada 2018 sebanyak 368 dan pada 2020 sebanyak 280 atau menurun sebanyak 24%. Sedangkan untuk provinsi yang mengisi form APE mengalami peningkatan dari 32 provinsi menjadi 33 provinsi.

Penurunan jumlah K/L, dan Kab/Kota yang mengisi form APE pada tahun 2020, seperti telah dijelaskan sebelumnya karena faktor pandemic covid 19. Akibat covid 19, terjadi refocusing anggaran dan perubahan kegiatan sehingga evaluasi PUG belum lagi menjadi kegiatan yang mendapat atensi.

3. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Deputi KG di 2020 telah melaksanakan salah satu kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional yaitu Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. Pelatihan dilakukan di lima provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Dasar pertimbangan lokus tersebut adalah provinsi yang desa-desanya menjadi target di Kemendes dan PDPTT.

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang telah memiliki basis di perdesaan dan telah melakukan pelatihan serupa, yaitu Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan. Tujuan bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat adalah untuk menjangkau perempuan perdesaan secara langsung dan untuk lebih menjamin keberlangsungan proses pelatihan kepemimpinan melalui pendampingan fasilitator perdesaan.

Di setiap provinsi yang menjadi lokus Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dilakukan di dua kabupaten menjadi tempat pelaksanaan pelatihan, sehingga secara keseluruhan ada 10 provinsi yang menjadi lokasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan seperti terlihat dalam matrik di bawah ini.

No	Provinsi Lokasi Kegiatan	Kabupaten Lokasi Kegiatan
1	Jawa Barat	Cianjur
		Sukabumi
2	Kalimantan Barat	Kuburaya
		Mempawah
3	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
		Mamuju
4	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
		Lombok Utara
5	Nusa Tenggara Timur	Lembata
		Flores Timur

Dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan tercapai dua hal yaitu:

- a. Tersedianya Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan. Modul ini adalah hasil sinergi 3 modul milik KPPPA, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan.
- b. Tersedianya 16 Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan

C. REALIASI ANGGARAN DEPUTI KESETARAAN GENDER

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	4 Asdep dan Sesdep	15.947.508.000	15.842.305.189	99,34 %	105.202.811

*Data OMSPAN per 7 Januari 2021

Anggaran Deputi KG sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana kerja Deputi KG adalah Rp. 48.200.000.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi Rp.15.081.696.000,- Pada bulan November 2020, Deputi Bidang Kesetaraan Gender melaksanakan Project To Support Women's Empowerment in Indonesia, yang merupakan program hibah dari Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) of the Republic of Korea, yang akan diimplementasikan dari tahun 2020 – 2024. Anggaran hibah ini menambah anggaran Deputi Bidang Kesetaraan Gender menjadi sebesar Rp. 15.947.508.000,- dan realisasi anggaran Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah sebesar 15.842.305.189 (99,34%).

Perubahan Pagu Anggaran Deputy KG 2020 setelah refocusing dan dengan penambahan dana hibah adalah sebagai berikut :

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING	PAGU SETELAH PENAMBAHAN ANGGARAN HIBAH
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum Dan Hankam	Rp.3.000.000.000	Rp. 2.228.515.000	Rp. 2.228.515.000
Assisten Deputy Kesetaraan Gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Rp. 2.700.000.000	Rp. 1.670.783.000	Rp. 1.670.783.000
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga*	Rp. 11.500.000.000	Rp. 2.911.305.000	Rp. 3.777.117.000
Asisten Deputy Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Rp. 23.500.000.000	Rp. 2.304.904.000	Rp. 2.304.904.000
Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Rp. 7.500.000.000	Rp. 5.966.189.000	Rp. 5.966.189.000
JUMLAH	Rp. 48.200.000.000	Rp. 15.081.696.000	Rp. 15.947.508.000

(*)Anggaran Hibah pada Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga

D. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai kinerja Deputy Bidang KG adalah pandemi covid-19 yang tiba-tiba melanda Indonesia mulai Maret hingga akhir 2020 yang juga belum selesai.

Wabah covid-19 yang menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan, dan sangat berdampak kepada berbagai kegiatan baik di tingkat pusat (K/L) dan maupun daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten) seperti kegiatan-kegiatan fasilitasi PUG dan PPRG bagi pemerintah pusat dan daerah.

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan kegiatan perjalanan dinas luar kota dan pertemuan – pertemuan yang bersifat tatap muka secara langsung;
2. Perubahan metode pelatihan dari tatap-muka secara langsung menjadi online sangat berdampak. Pemanfaatan anggaran yang lebih sedikit, namun target sasaran kegiatan menjadi lebih meningkat capaiannya. Kendala teknologi tidak dapat dipungkiri cukup

memberi dampak dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan daring yang melibatkan provinsi dan kabupaten/kota.

3. Pelatihan secara daring kepada masyarakat, seperti perempuan-perempuan perdesaan yang menjadi peserta pelatihan kepemimpinan misalnya, belum memungkinkan dilaksanakan karena masalah jaringan dan akses internet serta fasilitas zoom yang minim di perdesaan;
4. Sejumlah kegiatan akhirnya tetap dilakukan dengan tatap muka dengan lokasi yang masuk zona hijau dan dilaksanakan dengan protocol Kesehatan.

CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PERTAHANAN KEAMANAN

A. ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG POLHUHANKAM

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Asdep KG Bidang Polhuhankam) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

1. RENCANA AKSI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Asdep KG Bidang Polhuhankam mempunyai tiga indikator dan satu sasaran yang telah disepakati antara Asdep Bidang Polhuhankam dengan Deputi KG dalam sebuah perjanjian kerja. Sasaran Asdep Bidang Polhuhankam adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan beberapa provinsi/kabupaten/kota serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan tiga indikator yaitu:

1. Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya.
2. Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya.
3. Percepatan Pelaksanaan PUG

Dari tiga indikator berikut targetnya, kemudian diturunkan ke dalam sejumlah rencana aksi seperti terlihat dalam table di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Output	Rencana Aksi	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan dan beberapa provinsi/kabupaten/kot serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam.	K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	Pendampingan teknis pengintegrasian gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.	5 K/L
			Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.	
			Pelatihan Fasilitator PUG/PPRG bagi K/L.	
			Penyusunan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2020-2029	
			Penyusunan dan Ujicoba produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	
	Provinsi yang meningkat PUG/PPRGnya	Jumlah provinsi yang meningkat PUG/PPRGnya.	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi.	4 Prov
		Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.		

			Ujicoba produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	
			Pelatihan fasilitator PPRG bagi provinsi.	
Pelatihan Kepemimpinan perempuan perdesaan	Percepatan Pelaksanaan PUG	Tersedianya draft Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	FGD Penyusunan Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Modul Pelatihan Kepemimpinan perempuan Perdesaan
		Tersedianya 16 Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Workshop Fasilitator untuk Pelatihan Kepemimpinan perempuan perdesaan	16 orang
		Terlatihnya Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sejumlah 300 orang	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	5 Prov di 10 Kab

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Rencana aksi	Output	Outcome
1	K/L bidang Polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	Pendampingan teknis pengintegrasian gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.	15 K/L bidang polhuhankam didampingi secara teknis untuk melakukan pengintegrasian gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Meningkatnya kapasitas PUG/PPRG K/L bidang Politik, Hukum dan Hankam di 15 K/L

		Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.	15 K/L bidang polhuhankam didampingi untuk menyusun data terpilah menurut jenis kelamin.	Tersedianya Draft Panduan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam Pembentukan Peraturan PUU di 15 K/L bidang Polhuhankam.
		Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	Tersusunnya produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG.	Tersedianya : 1. Panduan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam Pembentukan Peraturan Per UU 2. Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPRD dan DPD 2020-2029.
		Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.	Terlatihnya 16 orang fasilitator PPRG bagi K/L bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.	Tersedianya fasilitator 17 orang dari lembaga masyarakat yang dipersiapkan untuk mendampingi K/L bidang politik, hukum dan hankam yang telah dilatih tentang konsep gender, PUG dan PPRG
2	Provinsi yang meningkat PUG/PPRGnya	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi	Provinsi dilakukan Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi	4 Provinsi melakukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi

		Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.	4 provinsi dilakukan pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.	4 provinsi melakukan penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.
		Penyusunan Produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG di Provinsi	Dilakukan ujicoba Panduan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 34 Provinsi di Indonesia	Penyempurnaan Panduan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3	Percepatan Pelaksanaan PUG	FGD penyusunan Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Tersedianya Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Modul Pelatihan Kepemimpinan perempuan Perdesaan
		Workshop Fasilitator utk Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Tersedianya 16 Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	16 Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan
		Pelatihan Kepemimpinan perempuan perdesaan	Terlatihnya Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sejumlah 300 orang	300 orang terlatihnya Kepemimpinan Perempuan Perdesaan

3. CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1: Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya.

Output dari indikator 1 adalah 15 K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang difasilitasi PUG.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan dan beberapa provinsi/kabupaten/kota, serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam	Jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5K/L	15 K/L	300%

Jumlah K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang menjadi target tahun 2020 sebanyak 5 K/L yaitu Kemenko Polhuhankam, Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Luar Negeri dan Kemendes dan PDTT. Alasan pemilihan 5 K/L itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2018, yang menyatakan pelembagaan PUG ke-5 K/L tersebut berpotensi untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan Indeks PUG tahun 2020.

Dalam realisasinya, indikator jumlah K/L (Kementerian/Lembaga) bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya (Pengarusahaan Gender/Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender) pada 2020 dilakukan terhadap 15 K/L. Persentase capaian ini sebanyak (300%) karena targetnya dalam indikator ini sebanyak 5K/L. Ke 15 K/L yaitu Kemenko Polhuhankam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan PDTT, Kemen PAN dan RB, Kemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Setjen DPR dan MABES TNI.

No	Target K/L	Capaian K/L
1	Kemenko Polhuhankam	Kemenko Polhuhankam
2	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri
3	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan
4	Kementerian Desa dan PDTT	Kementerian Desa dan PDTT
5	POLRI	POLRI
6		Kemen PAN dan RB
7		Kemen Hukum dan HAM
8		Mahkamah Agung
9		Kejaksaan Agung
10		Lembaga Administrasi Negara
11		Komisi Pemilihan Umum

12		Bawaslu
13		Badan Kepegawaian Negara
14		Setjen DPR
15		Mabes TNI

Ada empat kegiatan yang dilakukan Asdep Bidang Polhuhankam untuk mencapai indikator jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya. Keempat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
2. Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
3. Penyusunan produk Hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG.
4. Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dari empat kegiatan tersebut menghasilkan empat capaian yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas PUG/PPRG K/L bidang Politik, Hukum dan Hankam

Asdep KG Bidang Polhuhankam telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan utama melakukan fasilitasi K/L terkait PUG seperti yang ditargetkan dalam Renstra Kemen PPPA 2020-2024. Kegiatan ini terdiri dari beberapa aktivitas yaitu advokasi pengintegrasian gender ke dalam dokumen perencanaan, bimbingan teknis tentang pengintegrasian gender ke dalam dokumen perencanaan, serta bimbingan teknis data terpilah, dan pelatihan fasilitator PUG/PPRG di K/L.

Hasil pemetaan sebelum dilakukannya kegiatan ini mengungkapkan bahwa secara umum K/L bidang politik, hukum dan hankam masih belum mencapai status pelembagaan PUG yang baik. Oleh karena itu, rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Asdep KG Polhuhankam tahun ini berkontribusi pada tercapainya target meningkatnya kapasitas PUG/PPRG pada K/L bidang politik, hukum dan hankam dalam hal pemahaman tentang konsep gender, PUG, data terpilah dan teknis pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan.

Wabah covid-19 telah merubah metode pelaksanaan kegiatan dari tatap muka langsung (off-line) menjadi kegiatan secara daring (online). Seluruh kegiatan fasilitasi PUG kepada K/L

bidang politik, hukum dan hankam dilakukan secara daring. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari offline menjadi online tidak menjadi masalah dalam pencapaian output ini.

Hal ini juga berkontribusi pada capaian lain Asdep KG Bidang Polhuhankam yaitu jumlah K/L bidang politik, hukum dan hankam yang meningkat pemahamannya tentang konsep gender, PUG dan PPRG melebihi jumlah K/L yang telah ditargetkan. Jumlah K/L yang ditargetkan pada awal tahun 2020 adalah sebanyak 5 K/L. Namun karena terjadi wabah covid-19 dan kegiatan fasilitasi PUG, PPRG dan data terpilah kepada K/L bidang politik, hukum dan hankam dilaksanakan secara virtual, maka target peserta menjadi bertambah. Kegiatan yang direncanakan semula hanya dapat dilakukan untuk 5 K/L, pada saat pelaksanaan dapat dilaksanakan untuk seluruh K/L bidang politik, hukum dan hankam, yaitu sebanyak 13 K/L.

2. Tersedianya Panduan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam Pembentukan Peraturan PUU

Salah satu kegiatan Asdep Polhuhankam untuk mencapai indikator jumlah K/L bidang polhuhankam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya adalah kegiatan Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung capaian kesetaraan gender bidang hukum, yaitu membuat panduan bagi para penyusun Perundang-undangan supaya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang dihasilkan responsif gender.

Kegiatan tersebut menghasilkan draft PKG (Parameter Kesetaraan Gender) yang telah didiskusikan secara intensif dalam lingkup internal Kemen PPPA (internal satker Deputi Kesetaraan Gender) dan lintas satker serta dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Panduan tersebut kemudian diujicobakan dengan seluruh K/L pada tanggal 23 Oktober dan 2 November 2020, serta dengan Pemerintah Daerah di bulan November 2020.

3. Tersedianya Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPRD dan DPD 2020-2029

Pada tahun 2015, Kemen PPPA mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD dalam rangka Pemilu tahun

2019. Grand Design tersebut, pada 2019 dikembangkan menjadi Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dan Pengambilan Keputusan Menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030 dan dalam proses menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2020.

Pada rapat koordinasi lintas K/L dan lembaga masyarakat perempuan politik yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK pada bulan Januari 2020, Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dan Pengambilan Keputusan Menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030 yang dikembangkan oleh Kemen PPPA direkomendasikan menjadi Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Kemen PPPA bekerja sama dengan peneliti dari Perludem mengembangkan kembali Grand Design menjadi Peraturan Presiden.

Grand Design telah didiskusikan dengan K/L dan Pokjapol melalui beberapa FGD. Pokjapol (kelompok kerja politik perempuan) merupakan forum diskusi dan curah gagasan para penggiat perempuan politik dari lintas partai, peneliti dan mereka yang telah menjadi anggota parlemen.

4. Tersedianya fasilitator dari lembaga masyarakat yang dipersiapkan untuk mendampingi K/L bidang politik, hukum dan hankam yang telah dilatih tentang konsep gender, PUG dan PPRG

Dalam rangka mempersiapkan pendamping bagi K/L dalam memfasilitasi isu terkait PPRG, Deputi Bidang Kesetaraan Gender melatih fasilitator-fasilitator terutama yang berasal dari Lembaga Masyarakat dalam bidang PPRG yang telah bermitra dengan Kemen PPPA selama ini seperti Fitra, Pattiro dan MDS (Mitra Daya Setara). Asdep KG Bidang Polhuhankam telah melatih 16 calon fasilitator PPRG tingkat pusat yang berasal dari Lembaga Masyarakat mitra Kemen PPPA terkait PPRG yaitu Pattiro, Fitra dan MDS.

INDIKATOR 2: Jumlah provinsi yang meningkat PUG/PPRGnya.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan beberapa provinsi/kabupaten/kota, serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam	Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya.	4 Propinsi	4	100%

Indikator jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya pada 2020, dilaksanakan di empat provinsi yang menjadi target dengan capaian 100%, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

Alasan pemilihan 4 provinsi tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2018 dan status pelembagaan PUGnya, maka perlu memberikan pendampingan teknis pada 4 provinsi tersebut dalam upaya mendorong peningkatan Indeks PUG tahun 2020.

Untuk mencapai indikator jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya, dilakukan kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen renja di provinsi.
- b. Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.
- c. Uji coba produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG dan PPRG di seluruh provinsi
- d. Pelatihan fasilitator PPRG bagi Provinsi mitra.

Asdep KG Bidang Polhuhankam juga telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan utama melakukan fasilitasi provinsi tentang PUG seperti yang ditargetkan dalam Renstra Kemen PPPA 2020-2024. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan untuk K/L yaitu bimbingan teknis tentang pengintegrasian gender ke dalam dokumen perencanaan, dan bimbingan teknis data terpilah.

Perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari tatap muka langsung (off-line) menjadi kegiatan secara daring (online) karena covid yang dilakukan untuk seluruh kegiatan fasilitasi PUG kepada provinsi juga tidak menjadi masalah dalam pencapaian output ini. Namun demikian pada kegiatan yang dilakukan untuk provinsi tidak menambah target capaian provinsi yang difasilitasi. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan-kegiatan fasilitasi provinsi, peserta yang diundang cukup beragam selain Dinas PPPA dan Bappeda, yaitu OPD-OPD bidang pembangunan strategis terkait isu gender dan perlindungan anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum.

Oleh karena itu, rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Asdep KG Polhuhankam tahun ini kepada pemerintah provinsi mitra berkontribusi pada tercapainya target meningkatnya kapasitas PUG/PPRG pada provinsi mitra Asdep KG bidang Polhuhankam, yaitu Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Maluku Utara dalam hal pemahaman tentang konsep gender, PUG, data terpilah dan teknis pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan.

INDIKATOR 3: Percepatan pelaksanaan PUG

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang polhuhankam dan dan beberapa provinsi/kabupaten/kota, serta meningkatnya kapasitas perempuan tentang PUG bidang polhuhankam	Percepatan pelaksanaan PUG.	5 Provinsi	5	100%

Indikator percepatan pelaksanaan PUG 2020, dilakukan di lima provinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan capaian 100%. Dalam realisasi lokasi provinsinya mengalami perubahan dari target dalam perencanaan. Semula 5 provinsi yang menjadi target adalah Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur dan Lampung. Hanya satu provinsi yang tidak berubah yaitu Sulawesi Barat.

Perubahan dilakukan karena empat provinsi yang menjadi lokus kegiatan semula, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Lampung, tidak masuk zona hijau atau aman untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara offline atau tatap muka di masa pandemic covid-19. Lokasinya diganti dengan Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masuk zona hijau untuk melakukan pelatihan secara tatap muka. Data lokasi pelatihan yang masuk zona hijau bersumber dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan.

KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERDESAAN

Untuk melaksanakan indikator pelaksanaan percepatan PUG di provinsi, Asdep KG Bidang Polhuhankam memiliki satu Prioritas Nasional yaitu **Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan**. Pelatihan ini ditargetkan akan dilakukan di seluruh provinsi hingga tahun 2024. Seperti telah diuraikan sebelumnya, di tahun 2020, provinsi yang menjadi target atau sasaran untuk percepatan pelaksanaan PUG adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur

dan Sulawesi Barat. Dasar pertimbangan lokus tersebut adalah provinsi yang desa-desanya menjadi target di Kemendes dan PD TT.

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang telah memiliki basis di pedesaan dan telah melakukan pelatihan serupa, yaitu Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan. Tujuan bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat adalah untuk menjangkau perempuan pedesaan secara langsung dan untuk lebih menjamin keberlangsungan proses pelatihan kepemimpinan melalui pendampingan fasilitator pedesaan.

TAHAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN

PERSIAPAN PELATIHAN

Pertemuan koordinasi pertama dalam rangka persiapan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan secara off-line dilakukan pada Maret dengan PEKKA dan Institut Kapal Perempuan.

Pertemuan-pertemuan koordinasi berikutnya dilakukan secara daring, karena sudah diberlakukan PSBB setelah terjadi pandemic covid-19. Pertemuan bertujuan untuk menentukan metode pelaksanaan terbaik Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan di tengah wabah covid-19 yang melanda dunia.

Hasil beberapa pertemuan intensif dengan PEKKA dan Institut Kapal Perempuan memutuskan:

1. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan tetap dilaksanakan secara tatap muka langsung (off-line), namun pelatihan dilakukan di wilayah-wilayah hijau (bebas covid-19) di mana PEKKA dan Kapal Perempuan telah memiliki basis fasilitator cukup kuat serta tetap memperhatikan protokol kesehatan;
2. Keputusan untuk tetap melakukan pelatihan secara langsung (off-line) membawa konsekuensi perubahan target provinsi pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan, namun tidak merubah jumlah lokus pelaksanaan kegiatan, yaitu 5 (lima) provinsi. Perubahan lokus kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan dapat terlihat dalam matriks berikut :

No	Lokus Kegiatan Semula	Perubahan Lokus Kegiatan
1	Jambi	Jawa Barat
2	Sumatera Selatan	Kalimantan Barat
3	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
4	Jawa Timur	Nusa Tenggara Barat
5	Lampung	Nusa Tenggara Timur

3. Di lima provinsi yang menjadi lokus Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan ditentukan dua kabupaten yang menjadi tempat pelaksanaan pelatihan. Keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Ke 10 kabupaten tersebut seperti terlihat dalam matrik di bawah ini.

No	Provinsi Lokasi Kegiatan	Kabupaten Lokasi Kegiatan
1	Jawa Barat	Cianjur
		Sukabumi
2	Kalimantan Barat	Kuburaya
		Mempawah
3	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
		Mamuju
4	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
		Lombok Utara
5	Nusa Tenggara Timur	Lembata
		Flores Timur

Selama tahap persiapan pelatihan, Kemen PPPA telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang dilakukan secara daring yaitu:

- *Pertemuan Koordinasi* dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2020.
- *Focus Group Discussion (FGD)* sebanyak 5 kali dalam rangka sinergi Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan untuk menyatukan modul yang dimiliki oleh Kemen PPPA, PEKKA dan Institut Kapal Perempuan terkait pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan. FGD dilakukan antara ke-3 pihak Kemen PPPA, PEKKA dan Institut Kapal Perempuan, dan mengundang pakar-pakar gender termasuk pihak pembuat infografis dengan total pertemuan sebanyak 5 kali selama bulan September 2020. Kegiatan ini telah menghasilkan capaian tersedianya Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan.

- *Workshop Fasilitator* Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam rangka memperkuat fasilitator pelatihan. Workshop dilakukan selama dua hari, 13-14 Oktober 2020. Kegiatan ini telah menghasilkan tersedianya fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.

PELAKSANAAN PELATIHAN

Wabah covid-19 tidak memungkinkan jajaran Asdep KG Bidang Polhuhankam untuk melakukan perjalanan ke perdesaan, sehingga pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan secara tatap muka langsung dilaksanakan melalui kontrak Pihak ke-3, yaitu Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan. Dua Lembaga Masyarakat tersebut dipilih karena telah memiliki basis di pedesaan dan telah melakukan pelatihan serupa.

Tujuan bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat adalah untuk menjangkau perempuan perdesaan secara langsung dan untuk lebih menjamin keberlangsungan proses pelatihan kepemimpinan melalui pendampingan fasilitator perdesaan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2020 sampai 23 November 2020.

CAPAIAN PELATIHAN

Capaian dari kegiatan **Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan** adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. Modul ini adalah hasil sinergi 3 modul milik KPPPA, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Kapal Perempuan.
- b. Tersedianya 16 Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dilakukan oleh Kemen PPPA, PEKKA dan Institut Kapal Perempuan.

TINDAK LANJUT PELATIHAN

Kemen PPPA telah menindaklanjuti Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dengan melaksanakan secara off-line dan online setelah kegiatan Pelatihan selesai dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut bersama secara konkrit antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kepala desa dan peserta pelatihan. Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat menindaklanjuti kegiatan ini dengan melakukan replikasi di kabupaten dan desa lainnya.

4. REALIASI ANGGARAN

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Asdep Bidang Polhuhankam	2.228.515.000	2.223.112.753	99,75%	5.402.247 (0.25%)

Anggaran Asdep Bidang polhuhankam sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana kerja Asdep Bidang Polhuhankam adalah sebesar tiga miliar rupiah (Rp 3.000.000.000,00). Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi dua miliar, dua ratus duapuluh delapan juta, lima ratus lima belas ribu rupiah (Rp 2.228.515.000,00). Realisasi anggaran atau serapan anggaran mencapai 97,75% atau sebanyak dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta, seratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah (Rp2.223.112.753).

Anggaran Asdep Bidang Polhuhankam 2020 digunakan untuk membiaya kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	1.496.946.053	Prioritas Nasional
2	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	33.010.000,00	Output1/Indikator 1
3	Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	160.679.000,00	Output1/Indikator 1
4	Penyusunan produk Hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	101.184.000,00	Output1/Indikator 1

5	Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	129.879.000,00	Output1/Indikator 1
6	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen renja di provinsi	19.130.000,00	Output2/Indikator 2
7	Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi	17.300.000,00	Output2/Indikator 2
8	Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG dan PPRG di provinsi	111.000.000,00	Output2/Indikator 2
9	Pelatihan fasilitator PPRG bagi Provinsi,	153.984.700,00	Ouput2/Indikator 2

5. HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai kinerja Asdep KG Bidang Polhuhankam utamanya disebabkan karena pandemi covid-19 yang tiba-tiba melanda dunia sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2020.

Wabah covid-19 yang menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlalu berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah di tingkat pusat (K/L) dan daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten) sebagai target utama seperti kegiatan-kegiatan fasilitasi PUG dan PPRG bagi pemerintah pusat dan daerah.

Namun wabah covid-19 ini menjadi kendala pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung sebagai target kegiatan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pada masa awal pandemi tidak mungkin melakukan perjalanan ke luar kota dan tidak ada penerbangan;
2. Pelatihan secara daring kepada perempuan-perempuan perdesaan belum memungkinkan karena masalah jaringan dan akses internet serta fasilitas zoom yang minim di perdesaan;
3. Sempat ada usulan untuk merubah pendekatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, yaitu dengan fokus pada penguatan kapasitas fasilitator-fasilitator perdesaan untuk tahun 2020 karena dapat dilakukan secara online.
4. KemenPPPA hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi melalui Perwakilan di satu kabupaten pada setiap Provinsi karena pandemi covid-19.

CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI

B. ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi lebih dahulu melakukan perjanjian kinerja dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Perjanjian kinerja memuat sasaran program, indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

Dari perjanjian kinerja tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi kemudian menyusun rencana kerja (renja), yang memuat program, sasaran program, kegiatan, dan sasaran kegiatan, serta rincian kegiatan dan pendanaannya. Selanjutnya renja dituangkan kembali ke dalam rencana aksi. Langkah berikutnya adalah realisasi.

Dalam hal Penetapan Kinerja (PK), sasaran program/kegiatan yang ditetapkan oleh Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan telah disepakati oleh Deputi Kesetaraan Gender adalah : meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa provinsi serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut, awalnya ditetapkan tiga indikator, yaitu:

1. Indikator 1: Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya.
2. Indikator 2: Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya.
3. Indikator 3: Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Akses Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial.

Akan tetapi, indikator 3 kemudian mengalami *refocusing* akibat pandemi Covid-19. Anggarannya pun dialihkan untuk menangani wabah Covid-19 yang terjadi. Maka indikator

kinerja yang ditetapkan kemudian adalah indikator 1 dan indikator 2 saja beserta targetnya masing-masing, yaitu:

1. *Indikator 1:* Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya, dengan target 8 K/L
2. *Indikator 2:* Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya, dengan target sejumlah 4 provinsi.

Untuk memenuhi indikator kinerja tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi selanjutnya menyusun Rencana Kerja (Renja), yang rincian pemetaan kegiatannya sebagai berikut:

1. Indikator 1

Indikator K/L Bidang Ekonomi yang difasilitasi PUG terdiri dari:

- a. Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Ekonomi, dengan target 8 K/L.
- b. Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Ekonomi dengan target 8 K/L.
- c. Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG, dengan target 1 Kebijakan.
- d. Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat, dengan target 30 Orang.

2. Indikator 2:

Indikator provinsi yang difasilitasi PUG terdiri dari:

- a. Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi, dengan target 4 Provinsi.
- b. Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi, dengan target 4 Provinsi.
- c. Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG, dengan target sebanyak 3 Dokumen.
- d. Pelatihan Fasilitator PPRG di daerah, dengan target peserta pelatihan 20 Orang.

Dari rincian pemetaan kegiatan masing-masing indikator tersebut, kemudian disusun perencanaan anggaran bagi setiap kegiatan. Namun untuk tahun anggaran 2020,

rencana anggaran awal yang telah ditetapkan, kemudian mengalami revisi. Revisi dilakukan berkaitan dengan pandemi Covid-19, yang mengubah beberapa bentuk kegiatan dan munculnya pembiayaan yang berhubungan dengan pandemi.

Selain itu, terkait dengan indikator 3 mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000, statusnya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Diperlukan justifikasi dan penjelasan lebih lanjut untuk dapat membuka blokir. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengharuskan agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi anggaran dengan sasaran utamanya adalah anggaran yang masih diblokir. Oleh karena itu, kegiatan pada indikator 3 tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020.

Dengan adanya efisiensi karena pandemi tersebut anggaran yang dialokasikan pada Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi tersisa Rp 3.500.000.000, yang kemudian mengalami pemangkasan dan revisi di lingkup internal sehingga menjadi Rp 2.304.904.000.

1. RENCANA AKSI

Berdasarkan rencana kerja tahun 2020, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi kemudian menyusun rencana aksi yang pemenuhan targetnya dibagi per 3 (tiga) bulan, yang masing-masing terdiri atas Triwulan I : 25%; Triwulan II 50 %; Triwulan III : 75 %; dan Triwulan IV : 100%.

Secara rinci, Rencana Aksi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini: I

Sasaran	Indikator Kinerja/ Output	Kegiatan	Rencana Aksi	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa provinsi serta meningkatnya kapasitas dan	K/L bidang ekonomi yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif gender ke dalam dokumen Renja K/L	Pertemuan Advokasi PUG/PPRG di K/L Bidang Ekonomi	8 K/L
			Penguatan Pokja K/L	
			Pendampingan teknis Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Renja (dok GBS)	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PUG di K/L	
			Bimbingan Teknis Pengawasan PPRG bagi Auditor K/L	

peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	Bidang Ekonomi	Penyusunan Evaluasi GAP dan GBS	
		Kajian Isu Gender di Bidang Ekonomi	
		Serial Webinar tentang Peluang dan Solusi bagi Perempuan Pelaku Usaha Mikro pada masa new normal	
		Koordinasi, Persiapan dan Perumusan Materi Kegiatan APEC	
		Pendampingan Evaluasi PUG Bagi K/L Bidang Ekonomi	
		Pembuatan video tutorial tentang langkah-langkah penyusunan GAP dan GBS untuk K/L dan Daerah	
		Pembuatan video tutorial tentang Pengawasan PPRG untuk K/L dan Daerah	
		Serial Webinar Perjuangan Pergerakan Perempuan Indonesia (PHI)	
		Fasilitasi Pelaksanaan PUG untuk Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan	
		Update SISIR (Hosting dan Maintenance)	
Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin di K/L Bidang Ekonomi	Pertemuan Pokja PUG di K/L Bidang Ekonomi terkait Penyusunan Data Terpilah	Pemetaan Data terpilah dan Penyusunan profil gender di K/L Bidang Ekonomi	8 K/L
Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	Penyusunan Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Bidang Ekonomi dalam rangka Penyusunan Produk Hukum Implementasi PUG	Penyusunan Road Map PUG	1 Kebijakan
Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat	Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG di pusat		30 Orang

Provinsi yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif gender ke dalam dokumen Renja Provinsi	Pertemuan Advokasi PUG/PPRG di Provinsi	4 Provinsi
		Penguatan Pokja Provinsi	
		Pendampingan penyusunan GAP dan GBS di Provinsi	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PUG di Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PUG di Provinsi Penguatan PPRG bagi daerah terpilih 	
		Fasilitasi PPPA dalam rangka penanganan Covid 19	
		Serial Video Tutorial/Informatif Gerakan #BerJARAK	
		Model Pelaksanaan PPRG Desa	
		Fasilitasi Pelaksanaan PUG untuk Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pelaksanaan PUG untuk Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan Pelatihan Online bagi Perempuan Pelaku Usaha Mikro/IR 	
		Pemutakhiran data pelaku IR dan identifikasi kebutuhan spesifik melalui pendamping IR.	
		Update Sisir (Hosting, Kontak dan Maintenance)	
		Kajian Analisis Peningkatan IPG	
		Penyusunan Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Unit Kerja PP di Daerah <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Evaluasi PUG Bagi K/L dan Provinsi Bidang Ekonom 	
		Pembuatan Konten Media Bidang Ekonomi	
		Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Lokasi Bencana	
	Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin di Provinsi	Penyusunan Profil Gender di Provinsi (Pertemuan Pokja PUG di Provinsi terkait Penyusunan Data Terpilah)	4 Provinsi

	Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	Penyusunan Policy Recommendation Tentang Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	3 Dokumen
		Penyusunan Produk Hukum di Provinsi	
		Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Korban Kekerasan (Melalui FGD dan Serial Webinar)	
	Pelatihan Fasilitator PPRG di daerah		20 Orang

3. CAPAIAN KINERJA

Mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi yang ditetapkan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi sejak awal tahun, maka selama tahun 2020 capaian dari semua indikator adalah :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa provinsi serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	Indikator 1 : Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	8 K/L	11 K/L	137,5 %
	Indikator 2 : Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	4 Provinsi	9 Provinsi	225 %

Rincian dan penjelasan dari masing-masing indikator kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator 1

Jumlah K/L bidang ekonomi yang difasilitasi PUG-nya :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa provinsi serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	Jumlah K/L terkait bidang ekonomi binaan yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya.	8 K/L	11 K/L	137,5 %

Secara keseluruhan, pencapaian dari indikator 1, yaitu jumlah kementerian/lembaga (K/L) bidang ekonomi yang difasilitasi pengarusutamaan (PUG) gendernya, berhasil melebihi target yang direncanakan. Dari 8 K/L yang menjadi target awal, realisasi meningkat sebesar 137,5 % atau menjadi 11 K/L.

Ke-11 Kementerian/Lembaga tersebut adalah : Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian..

Akan tetapi dalam kaitan dengan rincian kegiatan per indikator, target yang direncanakan untuk teralisasi sebagaimana tercantum di dalam rencana kerja Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi tahun 2020, ternyata belum maksimal tercapai.

Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Ekonomi misalnya, dari 8 K/L yang menjadi rencana target ternyata hanya 5 K/L yang terealisasi atau hanya 62,5 %. Akan tetapi dalam kegiatan Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Ekonomi, realisasi target justru melampaui dari yang direncanakan semula. Dari target 8 K/L yang direncanakan, capaian meningkat hingga 137,5 % atau terealisasi hingga 11 K/L.

Tabel berikut ini merangkum hal tersebut:

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
K/L Bidang Ekonomi yang difasilitasi PUG :	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Ekonomi.	8 K/L	11 K/L	137,5 %
	Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Ekonomi.	8 K/L	5 K/L	62,5 %
	Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG.	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %
	Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat	30 Orang	30 Orang	100 %

Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif gender ke dalam dokumen Renja K/L Bidang Ekonomi dilakukan melalui beberapa kegiatan:

1. Melakukan pertemuan advokasi PUG/PPRG di K/L bidang ekonomi di 8 kementerian/lembaga, yaitu : Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Penguatan Pokja K/L dilakukan dengan melibatkan anggota pokja PUG di 9 K/L, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kementerian BUMN.
3. Melaksanakan pendampingan teknis Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Renja (Dokumen GBS) di 6 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PUG di K/L.

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan PPRG bagi Auditor di 4 kementerian/lembaga, yaitu : Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Melakukan Serial Webinar tentang Peluang dan Solusi bagi Perempuan Pelaku Usaha Mikro Pada Masa New Normal di 4 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
7. Melakukan koordinasi, persiapan dan perumusan materi kegiatan APEC bersama 4 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kementerian Keuangan.
8. Serial Webinar Perjuangan Pergerakan Perempuan Indonesia (PHI) dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan mengusung tema besar “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Rangkaian webinar ini merupakan kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat seperti KOWANI, MDS, dan SNKI.
9. Fasilitasi Pelaksanaan PUG untuk Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan, dilakukan di Provinsi Gorontalo. Bantuan ini diberikan dalam bentuk biskuit, vitamin, susu balita, popok, dan kebutuhan spesifik perempuan dan lansia lainnya.
10. Adapun pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikut: (a) Penyusunan Evaluasi GAP dan GBS; (b) Pendampingan Evaluasi PUG bagi K/L bidang Ekonomi; (c) Penyusunan Kajian Isu Gender di Bidang Ekonomi; (d) Pembuatan video tutorial tentang langkah-langkah penyusunan GAP dan GBS untuk K/L dan Daerah; (e) Pembuatan video tutorial tentang Pengawasan PPRG untuk K/L dan Daerah; (f) Penyusunan Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Unit Kerja PP di Daerah; dan (g) Pemetaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Badan Pusat Statistik; dilakukan melalui mekanisme kontrak dengan berbagai lembaga masyarakat dan pakar gender.

Sedangkan Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Ekonomi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan Pertemuan Pokja PUG di K/L Bidang Ekonomi terkait Penyusunan Data Terpilah dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Menyusun Profil Perempuan Pelaku Usaha Mikro di Bidang Kelautan, kerja sama dengan Comdev. Profil ini disusun untuk memperlihatkan situasi dan kondisi para perempuan pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta strategi yang dapat dilakukan untuk membangkitkan usaha mereka.

Sementara dalam Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan Penyusunan Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Bidang Ekonomi dalam rangka Penyusunan Produk Hukum Implementasi PUG, bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyusunan ini menghasilkan 2 produk hukum.
2. Melaksanakan Penyusunan Road Map PUG melalui 2 kali pertemuan *focus group discussion*.

Untuk kegiatan Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat, kegiatan yang dilakukan berupa:

1. Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG / Refreshing Fasilitator Nasional PUG/PPRG
2. Evaluasi Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG

Indikator 2

Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L terkait bidang ekonomi dan beberapa provinsi serta meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah provinsi tentang PUG bidang ekonomi	Jumlah Provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya	4 Provinsi	9 Provinsi	225 %

Secara keseluruhan, pencapaian dari indikator 2, yaitu jumlah provinsi yang meningkat kapasitas kelembagaan PUG/PPRG-nya, berhasil melebihi target yang direncanakan. Dari 4 provinsi yang menjadi target awal, realisasi meningkat sebesar 225 % atau menjadi 9 provinsi.

Ke-9 provinsi tersebut adalah : Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.

Merujuk pada sasaran dan indikator pertama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Asdep KG Bidang Ekonomi yaitu jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya, dari target 4 provinsi sudah tercapai semuanya yaitu: Provinsi Aceh; Provinsi Gorontalo; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel berikut ini merangkum rincian capaian tersebut:

Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Provinsi yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi.	4 Provinsi	8 provinsi	200%
	Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi.	4 Provinsi	3 Provinsi	75 %
	Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG.	3 Dokumen	3 dokumen	100%
	Pelatihan Fasilitator PPRG di daerah	20 Orang	20 orang	100%

Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan penguatan kelompok kerja (pokja) di Provinsi di Aceh, Gorontalo dan Kalimantan Tengah.
2. Melakukan pendampingan penyusunan GAP dan GBS di Provinsi Aceh dan Bangka Belitung.
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PUG di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat dan Aceh.
4. Melaksanakan Fasilitasi PPPA dalam rangka penanganan Covid 19, antara lain pengumpulan data Survei Dampak Covid terhadap Pelaku Industri Rumahan di 21 Kab/Kota; menyusun KIE Tips Berniaga yang Aman berupa poster dan video tutorial; dan serial video tutorial promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro di era pandemi.

5. Menyusun Serial Video Tutorial/Informatif Gerakan #BerJARAK, yaitu serial video untuk mempromosikan Gerakan #BerJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita). Gerakan ini memiliki fokus utama intervensi terhadap kelompok rentan terdampak dari bahaya paparan COVID-19, seperti anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang diberikan perlindungan secara adil, non diskriminatif dan bebas dari stigma.
6. Menerapkan model Pelaksanaan PPRG Desa melalui kegiatan workshop PPRG Desa bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan. Di Kabupaten Katingan, kegiatan workshop PPRG Desa ditujukan kepada para kepala dan perencana desa.
7. Melakukan fasilitasi pelaksanaan PUG untuk pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan di 3 provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk biskuit, vitamin, susu balita, popok, dan kebutuhan spesifik perempuan dan lansia lainnya.
8. Melaksanakan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penyintas, Rangkaian Promosi Strategi Kebijakan Kesetaraan Gender dan Pembuatan Konten Video Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian kegiatan untuk mendukung Hari Puncak Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.
9. Melakukan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Badan Pusat Statistik, dilakukan dengan 4 kali FGD dengan menghadirkan narasumber dan pakar IPG dari BPS.
10. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Lokasi Bencana, dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan (Luwu Utara), dan Sulawesi Tengah (Palu). Fasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang diberikan adalah pemberian masker, serta peralatan untuk pelatihan memasak.

Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Profil Gender dalam Pertemuan Pokja PUG, yang dilakukan di provinsi Gorontalo, Aceh dan Bangka Belitung.

Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG. Dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan:

1. Melakukan Penyusunan Policy Recommendation Tentang Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi melalui 3 kali kegiatan focus group discussion (FGD) dengan Sri Institute.

2. Menyusun Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Korban Kekerasan melalui serial FGD.
3. Melaksanakan Pelatihan Fasilitator PPRG di daerah, meliputi Provinsi Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung.

4. REALISASI ANGGARAN

Mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, serta perubahan (revisi) anggaran yang dilakukan dalam tahun berjalan, maka realisasi anggaran program/kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	K/L Bidang Ekonomi yang difasilitasi PUG	945.962.000	943.244.000	99,71	2.718.000
	a Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Ekonomi	713.978.000	711.314.000	99,62	2.664.000
	b Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Ekonomi	92.584.000	92.530.000	99,94	54.000
	c Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG	104.600.000	104.600.000	100,00	0
	d Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat	34.800.000	34.800.000	100,00	0
2	Provinsi yang difasilitasi PUG	1.358.942.000	1.350.796.593	99,40	8.145.407
	a Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja Provinsi	1.169.777.000	1.161.846.593	99,32	7.930.407
	b Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di Provinsi	15.900.000	15.750.000	99,05	150.000

	c	Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG	156.315.000	156.250.000	99,95	65.000
	d	Pelatihan Fasilitator PPRG di Daerah	16.950.000	16.950.000	100,00	0
JUMLAH			2.304.904.000	2.294.040.593	99,52	10.863.407

Awalnya, anggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi, sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana kerja Asdep Bidang Ekonomi adalah Rp. 23.500.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar tiga miliar rupiah), yang terdiri dari pagu anggaran untuk 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Indikator Kinerja K/L Bidang Ekonomi yang difasilitasi PUG: Rp. 1.400.000.000.
2. Indikator Kinerja Provinsi yang difasilitasi PUG: Rp. 2.100.000.000.
3. Indikator Kinerja Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Akses Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Rp. 20.000.000.000.

Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan revisi anggaran sehingga menjadi total Rp. 2.304.904.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).

Penurunan anggaran yang cukup jauh ini disebabkan karena anggaran untuk Indikator Kinerja Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Akses Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dialihkan untuk bantuan covid 19, sehingga hanya memunculkan 2 (dua) indikator kinerja saja, yaitu :

1. Indikator Kinerja K/L Bidang Ekonomi yang difasilitasi PUG: Rp. 945.962.000 (revisi).
2. Indikator Kinerja Provinsi yang difasilitasi PUG: Rp. 1.358.942.000 (revisi).

Dari total anggaran setelah revisi sebesar Rp. 2.304.904.000, realisasi anggaran atau serapan anggaran mencapai 99,52 % atau sebanyak Rp. 2.294.040.593 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Dari persentase serapan anggaran sebesar 99,52 % tersebut, beberapa kegiatan mencapai realisasi 100 %, yaitu kegiatan: (1) Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung PUG/PPRG; (2) Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat; dan (3) Pelatihan Fasilitator PPRG di Daerah. Kegiatan (1) dan (2) merupakan kegiatan dalam program kelompok/lembaga

bidang ekonomi yang difasilitasi PUG, sedangkan kegiatan (3) merupakan kegiatan dalam program Provinsi yang difasilitasi PUG.

Kegiatan-kegiatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, realisasi anggaran memang berada di bawah persentase 100 % namun seluruhnya berada di atas 99 %.

CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

C. ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG DIKESGA

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga (DIKESGA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga..

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga lebih dahulu melakukan perjanjian kinerja dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Perjanjian kinerja memuat sasaran program, indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

Dari perjanjian kinerja tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga kemudian menyusun rencana kerja (renja), yang memuat program, sasaran program, kegiatan, dan sasaran kegiatan, serta rincian kegiatan dan pendanaannya. Selanjutnya renja dituangkan kembali ke dalam rencana aksi. Langkah berikutnya adalah realisasi.

Dalam hal Penetapan Kinerja (PK), sasaran program/kegiatan yang ditetapkan oleh Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga telah disepakati oleh Deputi Kesetaraan Gender adalah : meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan tiga indikator beserta targetnya masing-masing, yaitu:

1. *Indikator 1:* Jumlah K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG, dengan target 5 K/L
2. *Indikator 2:* Jumlah daerah yang difasilitasi PUG-nya, dengan target sejumlah 5 provinsi.
3. *Indikator 3:* Percepatan Pelaksanaan PUG, dengan target sebanyak 12 K/L/Provinsi.

Untuk memenuhi indikator kinerja tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga selanjutnya menyusun Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan rencana kerja tahun 2020, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga kemudian menyusun rencana aksi yang pemenuhan targetnya dibagi per 3 (tiga) bulan, yang masing-masing terdiri atas Triwulan I : 25%; Triwulan II 50 %; Triwulan III : 75 %; dan Triwulan IV : 100%

1. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Output	Rencana Aksi	Target
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	Jumlah K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	5 K/L
			Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	
			Penyusunan Pedoman dan Publikasi Kualitas keluarga.	
			Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat.	

Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	Jumlah provinsi yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi.	5 Provinsi
		Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi.	
		Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG di Provinsi.	
		Pelatihan Fasilitator PPRG di Provinsi.	
		Fasilitasi PPRG Penanggulangan Stunting.	
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Percepatan Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Sekolah Perempuan tingkat desa yang terbentuk	Penyusunan pedoman pelaksanaan sekolah perempuan dan kurikulum sekolah perempuan	1 Provinsi
		Koordinasi lintas K/L dan Pemda dalam rangka pelaksanaan Sekolah Perempuan.	
		ToT bagi Pengajar pendamping Sekoper.	
		Aktivasi Sekolah Perempuan.	
		Monitoring dan Evaluasi Sekolah Perempuan.	
	Kementerian/Lembaga yang difasilitasi Bimbingan Teknis PPRG Stunting	Penyempurnaan Pedoman Bimtek PPRG Penurunan Stunting	1 K/L
		Persiapan dan Advokasi Pelaksanaan Bimtek	
		Pelaporan	
	Pendidikan dan Pelatihan PPPA bagi, Manager	Menyiapkan Kurikulum & Modul	1 Lembaga (PNM)
		Ujicoba	

		Wilayah, Senior Pendamping dan Pendamping pelaku Usaha Ekonomi Mikro	Penyempurnaan Kurikulum dan Modul	
--	--	--	-----------------------------------	--

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Rencana aksi	Output	Outcome
1	K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Melakukan pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja di 10 K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	10 K/L meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
		Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Melakukan pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di 4 K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	4 Laporan Umpan Balik (<i>feed back</i>) Analisis Gender Kegiatan/Tema ARG pada kementerian/ lembaga.
		Penyusunan Pedoman dan Publikasi Kualitas keluarga.	Dilakukan penyusunan publikasi Kualitas Keluarga	Disusunnya Pedoman dan Publikasi Kualitas keluarga
		Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat.	Melakukan pelatihan fasilitator PPRG bagi 11 peserta di K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Melakukan pelatihan fasilitator PPRG 11 orang K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
2	Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi.	Melakukan pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen renja di 9 provinsi	9 provinsi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen renja

		Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi.	Melakukan pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di 9 provinsi	4 Laporan Umpan Balik (<i>feed back</i>) Analisis Gender Kegiatan/Tema ARG Provinsi.
		Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG di Provinsi.	Telaah produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG dan PPRG di 9 provinsi	4 produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG yang ditelaah
		Pelatihan Fasilitator PPRG di Provinsi.	Dilakukan Pelatihan PPRG bagi 18 fasilitator provinsi di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	18 orang dilatih sebagai sebagai fasilitator PPRG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
3	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Percepatan Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Fasilitasi PPRG Penanggulangan Stunting.	Dilakukan pendampingan fasilitasi PPRG Penanggulangan Stunting pada 7 satker yang memiliki output penanggulangan stunting di Kementerian Kesehatan RI	1 K/L yang telah memahami PPRG Stunting untuk melakukan tagging output stunting pada program/kegiatan di Kementerian Kesehatan dan kedepannya akan dilakukan evaluasi terhadap 3 K/L lain dan berlanjut pada saat turun ke Provinsi/Kab/Kota yang menjadi lokus stunting
		Fasilitasi pengembangan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui sekolah perempuan	Mengembangkan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui sekolah perempuan	3 (tiga) pusat pemberdayaan masyarakat desa melalui sekolah perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah berjalan.
		Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan PPPA bagi Pelaku Usaha ekonomi Mikro	Pendidikan dan pelatihan PPPA bagi Pelaku Usaha ekonomi Mikro	25 (Manager Wilayah, SAO, Account Officer) mengikuti Pendidikan dan pelatihan PPPA

3. CAPAIAN KINERJA

Mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi yang ditetapkan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga sejak awal tahun, maka selama tahun 2020 capaian dari semua indikator adalah :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	Indikator 1: K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	5 K/L	10 K/L	200 %
	Indikator 2: Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	5 Provinsi	9 Provinsi	180 %
	Indikator 3: Percepatan Pelaksanaan PUG	12 K/L/Provinsi	12 K/L/Provinsi	100 %

Rincian dan penjelasan dari masing-masing indikator kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator 1

Jumlah K/L bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga yang difasilitasi PUG:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	5 K/L	10 K/L	200 %

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengikuti indikator K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG adalah berupa:

- a. Sebelum pandemi Covid 19 pada bulan Februari - Maret 2020 fasilitasi (advokasi) PUG bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga telah dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Pada saat situasi pandemic covid 19 mulai berlangsung, penyeleggaraan tetap dilakukan secara online pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada kurun waktu hingga Oktober 2020 advokasi PUG bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dilakukan

pada K/L lainnya yaitu: Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, BPOM, Lemhanas, BNN dan Kementerian Kesehatan

- b. Selain itu, pendampingan menggunakan Aplikasi APE di K/L juga dilakukan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan PUG. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan PUG di K/L secara periodik, Deputi Bidang KG memang melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di K/L secara rutin. Agar hasil evaluasi dapat diukur secara langsung melalui Indeks PUG dan dapat tersimpan sebagai database, Deputi mengembangkan Aplikasi APE (Monev PUG). Untuk itu Asdep KG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga memastikan pelaksanaan tersebut melalui pendampingan baik Tim Monev K/L. Dalam situasi pandemic Covid 19 kegiatan ini dilaksanakan melalui Video Conference. Sampai dengan bulan oktober telah dilakukan pendampingan pada semua Kementerian/Lembaga.
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPRG di Kementerian/Lembaga juga sudah dilakukan, dengan melaksanakannya secara online melalui Video Conference akibat adanya pandemic Covid-19. Hingga bulan September, kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan PPRG pada tahun 2020 setidaknya sudah mencapai target yang direncanakan, yaitu pada 5 Kementerian/Lembaga: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan BKKBN. Meskipun demikian, kegiatan yang berlangsung, harus diakui, tetap mengalami kendala. Hal ini sebagian disebabkan oleh kendala jaringan atau akibat pada waktu yang bersamaan kementerian/lembaga yang terkait juga sedang memiliki kegiatan.
- d. Dalam hal kegiatan pendampingan penyusunan data gender di Kementerian/lembaga (K/L), secara umum data terpilah di K/L memang belum memadai dan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk itu proses pendampingan kegiatan ini dilakukan secara paralel dengan kegiatan Bimtek PPRG. Karena pada pelaksanaan PPRG dalam proses analisis gender K/L akan juga dilakukan identifikasi kebutuhan Data terpilah untuk mendukung pelaksanaan PPRG. Dengan demikian pendampingan ini juga dapat mengubah *mind set* para pengelola data akan pentingnya data gender untuk perencanaan. Pelaksanaan pendampingan data gender di K/L dilakukan bekerjasama dengan pakar/konsultan.
- e. Sebagai upaya memperkuat SDM pelaksana PUG di kementerian/lembaga, Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga memfasilitasi pelatihan bagi para calon fasilitator PUG di

kementerian/lembaga. Metode pelatihan fasilitator disesuaikan dengan situasi pandemic, yaitu secara virtual. Kriteria calon fasilitator adalah yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang Pengarusutamaan Gender, dan memiliki pengalaman telah melakukan pendampingan. Peserta terbuka juga diikutsertakan, yaitu para peserta yang berasal dari lembaga masyarakat. Pelaksanaan pelatihan fasilitator bekerjasama dengan pakar dan fasilitator nasional yang terlatih.

Indikator 2

Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG-nya:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di Provinsi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dan Pemda	Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	5 Provinsi	9 Provinsi	180 %

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengikuti indikator jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG adalah berupa:

- a. Di daerah, pelaksanaan fasilitasi PUG bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dilakukan memilih lebih dahulu daerah yang memiliki status PUG dengan kategori masih rendah. Pada situasi sebelum pandemic Covid 19 advokasi PUG telah dilaksanakan pada provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur. Untuk daerah-daerah lainnya dilaksanakan melalui video conference dikarenakan waktu pelaksanaannya sudah memasuki masa pandemic Covid-19.
- b. Selain itu, seperti juga yang dilakukan di kementerian dan lembaga, pendampingan menggunakan Aplikasi APE di daerah juga dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan PUG. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan PUG di daerah secara periodik dan rutin, dan agar hasil evaluasi dapat diukur secara langsung melalui Indeks PUG serta dapat tersimpan sebagai database, Deputi mengembangkan Aplikasi APE (Monev PUG). Untuk itu Asdep KG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga memastikan pelaksanaan tersebut melalui pendampingan baik Tim Monev Daerah. Dalam

situasi pandemic Covid 19, program ini dilaksanakan secara online melalui video conference.

- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPRG di daerah juga sudah dilakukan, dengan melaksanakannya secara online melalui Video Conference akibat adanya pandemic Covid-19. Hingga bulan September, kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan PPRG pada tahun 2020 setidaknya sudah mencapai target yang direncanakan, yaitu pada 4 provinsi, yaitu : Kalimantan Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, sama halnya dengan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan di kementerian/lembaga, program yang berlangsung tetap mengalami kendala. Sebagian akibat kendala jaringan dan sebagiannya lagi disebabkan pada waktu yang bersamaan daerah yang terkait juga sedang memiliki kegiatan.
- d. Dalam hal kegiatan pendampingan penyusunan data gender di Kementerian/lembaga (K/L), secara umum data terpilah di daerah memang belum memadai dan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk itu proses pendampingan kegiatan ini dilakukan secara paralel dengan kegiatan Bimtek PPRG. Karena pada pelaksanaan PPRG dalam proses analisis gender daerah akan juga dilakukan identifikasi kebutuhan data terpilah untuk mendukung pelaksanaan PPRG. Dengan demikian pendampingan ini juga dapat mengubah *mind set* para pengelola data akan pentingnya data gender untuk perencanaan. Pelaksanaan pendampingan data gender di daerah dilakukan bekerjasama dengan pakar/konsultan.
- e. Sama dengan di kementerian/lembaga, sebagai upaya memperkuat SDM pelaksana PUG di daerah, Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga memfasilitasi pelatihan bagi para calon fasilitator PUG di daerah. Metode pelatihan fasilitator disesuaikan dengan situasi pandemic, yaitu secara virtual. Kriteria calon fasilitator adalah yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang Pengarusutamaan Gender, dan memiliki pengalaman telah melakukan pendampingan. Peserta terbuka juga diikutsertakan, yaitu para peserta yang berasal dari lembaga masyarakat, akademisi, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan pelatihan fasilitator bekerjasama dengan pakar dan fasilitator nasional yang terlatih.

Indikator 3

Jumlah Provinsi yang mendapatkan percepatan Pelaksanaan PUG:

Bahwa keberhasilan pelaksanaan PUG Daerah adalah terlaksananya pelebagaan PUG melalui pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat PUG, yang meliputi: 1) Komitmen, 2) Kebijakan, 3) Kelembagaan, 4) SDM dan Anggaran; 5) Data Terpilah; 6) Alat analisis/Instrumen; dan 7) Jejaring/Partisipasi Masyarakat. Untuk itu kegiatan penguatan pelebagaan PUG di daerah menjadi kegiatan yang rutin diupayakan untuk menjamin pelaksanaan PUG dan PPRG secara berkesenambungan. Demikian pada T.A 2020 Asdep KG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga, menyelenggarakan penguatan pelebagaan PUG Daerah:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di Provinsi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Percepatan Pelaksanaan PUG	12 K/L/Provinsi	12 K/L/Provinsi	100 %

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan PUG pada isu-isu gender yang membawa dampak pada menurunnya kualitas hidup perempuan, maka Deputi Bidang Kesetaraan Gender melalui Asdep KG bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga mengangkat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui:

a. Pelaksanaan PPRG Stunting

Pandemi Corona telah menimbulkan efek pada peningkatan jumlah kemiskinan, keterbatasan akses kecukupan pangan, keterbatasan layanan kesehatan yang berimbas pada pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan (HPK), Balita, remaja putri hingga ibu hamil yang merupakan kelompok target program penurunan stunting. Situasi ini juga mempengaruhi intervensi penurunan stunting yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung serta intervensi gizi sensitive untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan intervensi gizi spesifik dilakukan oleh K/L lainnya termasuk Kementerian PPPA yang merupakan faktor pendorong dan probabilitas tercapainya keberhasilan. Maka pelaksanaan PPRG dilakukan untuk memastikan *tagging output stunting* K/L yang dibarengi dengan analisis gender, sehingga

program dan kegiatan tersebut akan responsive terhadap kebutuhan, pengalaman dan aspirasi dari sasaran program.

Pendampingan akan dilakukan bergilir 2020-2024 pada 15 K/L. pendampingan ini memastikan tersusunnya GAP, GBS dan TOR output yang di tagging stunting, sehingga otomatis juga mendorong output tersebut untuk dilakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Setelah itu akan diambil 3 K/L besar yang di evaluasi hingga pada saat turun lapangan di Kabupaten/Kota yang menjadi lokus stunting.

Pada saat pandemi di tahun 2020 ini pendampingan dilakukan dengan meminimalisasi tatap muka yaitu melalui media *video conference*. Pendampingan juga didahului dengan advokasi pada Bappenas khususnya bidang Gizi dan Kesehatan Masyarakat dan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil yang dibentuk oleh Setwapres, serta UN Women yang telah berpengalaman dalam mengevaluasi PPRG Stunting agar saat dilakukan evaluasi capaian tagging stunting dapat memasukkan evaluasi nilai-nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas SDM Perencana Program dan Anggaran yang memiliki kapasitas dalam PPRG, maka sesuai dengan target outout stunting K/L tahun 2020, pada kurun waktu Bulan November 2020 Asdep Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga melalui video conference melaksanakan Workshop Bimbingan Teknis PPRG Penurunan Stunting terhadap 7 satker di Kementerian Kesehatan RI.

b. KIE Pencegahan Covid-19 dalam Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Sebagai respon Asdep Dikesga terhadap pandemic covid-19 maka dibuat KIE Pencegahan Covid-19 terkait isu Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga. Dalam pembuatan KIE ini bekerja sama dengan JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia), PERSAGI dan PERGIZI, serta akademisi.

c. Pengembangan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sekolah Perempuan

Sebagai upaya percepatan pengarusutamaan gender di tingkat akar rumput / pedesaan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender mengembangkan model Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui sekolah perempuan. Pada tahun 2018/2019 telah dikembangkan model sekolah perempuan di Kabupaten Waropen Papua dan di 3 (tiga) desa Kabupaten TTS Provinsi NTT. Untuk memastikan Pusat pemberdayaan masyarakat desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk pemerintah desa khususnya di Kabupaten TTS, maka perlu

dilakukan pematapan atas model tersebut. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Evaluasi pelaksanaan Sekolah Perempuan melalui FGD antara KPPPA, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten TTS dan Fasilitator Tingkat Provinsi/Kabupaten dan menghasilkan kesepakatan untuk pembuatan roadmap pelaksanaan sekolah perempuan dan pembagian peran dimulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga Desa.
- Pendampingan penyusunan Roadmap dan kebijakan Pusat Pemberdayaan masyarakat desa.
- Fasilitasi bantuan sarana belajar mengajar.

Kerjasama juga dilakukan dengan Pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan model pemberdayaan perempuan desa melalui “Sekoper Cinta” di Provinsi Jawa Barat. Kerjasama ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan di sektor ekonomi Melalui Pelatihan Pengembangan Kurikulum dan Material Belajar, Penyediaan Master Trainer dan Mobile Trainer Vokasi untuk memperkuat Inkubator Usaha (*Business Incubator*). Sasarannya adalah:

1. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Indonesia melalui Program-Pelatihan Vokasi;
2. Membangun Sistem yang menghubungkan program pelatihan vokasi pada pekerjaan dan kewirausahaan;
3. Membangun dan menyebarluaskan Model Pelatihan Vokasi yang terintegrasi Gender untuk penguatan pemberdayaan sosia ekonomi perempuan melalui pelatihan vokasi
4. Peningkatan kebijakan PUG terutama berkaitan dengan pelatihan vokasi untuk perempuan.

4. REALISASI ANGGARAN

Mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga, serta perubahan (revisi) anggaran yang dilakukan dalam tahun berjalan, maka realisasi anggaran program/kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG	953.884.000	953.832.042	99,99	51.958
a	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga.	97.800.000	97.800.000	100,00	0
b	Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga.	472.701.000	472.650.000	99,98	51.000
c	Penyusunan Pedoman dan Publikasi Kualitas keluarga	153.550.000	153.550.000	100,00	0
d	Pelatihan Fasilitator PPRG di Pusat.	229.833.000	229.832.042	99,99	958
2	Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG	2.823.233.000	1.954.960.981	69,24	868.272.019
a	Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi.	291.224.000	291.224.000	100,00	0
b	Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi.	221.500.000	221.500.000	100,00	0
c	Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung PUG/PPRG di Provinsi.	202.700.000	202.684.000	99,99	16.000
d	Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Percepatan PUG di Provinsi.	1.827.666.000	959.504.344	52,49	868.161.656
e	Pelatihan Fasilitator PPRG di Provinsi.	20.500.000	20.500.000	100,00	0
d	Fasilitasi PPRG Penanggulangan Stunting	259.643.000	259.548.637	99,96	94.363
JUMLAH		3.777.117.000	2.908.793.023	77,01	868.323.977

Awalnya, anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga, sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana

kerja Asdep Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga adalah Rp. 11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta), yang terdiri dari pagu anggaran untuk 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Indikator K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG: Rp. 1.481.420.000.
2. Indikator Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG: Rp. 3.018.580.000.
3. Indikator Percepatan Pelaksanaan PUG: Rp. 7.000.000.000.

Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan refocusing anggaran sehingga menjadi total Rp. 3.777.117.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Penurunan anggaran yang cukup jauh ini disebabkan karena anggaran untuk Indikator Percepatan Pelaksanaan PUG dalam bentuk Sekolah Perempuan tingkat desa sebesar Rp 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga hanya memunculkan 2 (dua) indikator kinerja saja, yaitu :

1. Indikator K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG: Rp. 953.884.000 (revisi).
2. Indikator Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG: Rp. 2.823.233.000 (revisi).

Dari total anggaran setelah revisi sebesar Rp. 3.777.117.00, realisasi anggaran atau serapan anggaran mencapai 77,01 % atau sebanyak Rp. 2.908.793.023 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Puluh Tiga Rupiah).

Dari persentase serapan anggaran sebesar 77,01 % tersebut, beberapa kegiatan tetap mencapai realisasi 100 %, yaitu kegiatan : (1) Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja K/L Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga; (2) Penyusunan Pedoman dan Publikasi Kualitas keluarga; (3) Pendampingan Teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Dokumen Renja di Provinsi; dan (4) Pendampingan Teknis Penyusunan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi. Kegiatan (1) dan (2) merupakan kegiatan dalam program kelompok/lembaga Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga yang difasilitasi PUG, sedangkan kegiatan (3) dan (4) merupakan kegiatan dalam program Pemerintah Daerah yang difasilitasi PUG.

Kegiatan-kegiatan lainnya, kecuali kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Percepatan PUG di Provinsi, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, realisasi anggaran memang berada di bawah persentase 100 % namun seluruhnya berada di atas 99%.

Dalam hal kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Percepatan PUG di Provinsi, persentase anggaran yang terserap hanya mencapai 52,49 %. Hal ini disebabkan sampai dengan 31 Desember 2020, pengadministrasian kegiatan yang bersumber dari Dana Hibah kerjasama dengan Korea belum masuk ke dalam realisasi SAS, sementara kegiatan dan target sudah selesai semua di bulan Desember 2020.

CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

D. ASISTEN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan (Asdep KG Bidang Infraling) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur, iptek, dan lingkungan.

1. RENCANA AKSI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Asdep KG Bidang Infraling mempunyai satu sasaran dengan dua indikator yang telah disepakati antara Asdep Bidang Infraling dengan Deputi KG dalam sebuah perjanjian kerja. Adapun sasaran Asdep Bidang Infraling adalah meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang infrastruktur, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lingkungan dan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan dua indikator yaitu:

1. Jumlah K/L bidang infrastruktur lingkungan yang terfasilitasi PUG;
2. Jumlah daerah (provinsi) yang terfasilitasi PUG

Dari dua indikator berikut targetnya, kemudian diturunkan ke dalam sejumlah rencana aksi seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel: Rencana Aksi Asdep KG Bidang Infraling

Sasaran	Indikator Kinerja	Output	Rencana Aksi	Target
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan PUG di K/L Bidang Infraling dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas dan peran perempuan tentang PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	K/L Bidang Infraling yang terfasilitasi PUG	Jumlah K/L Bidang Infraling yang terfasilitasi PUG	Pendampingan teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke Dalam dokumen Renja K/L Bidang Infraling	2 K/L
			Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang Infraling	2 K/L
			Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-undangan yang mendukung PUG dan PPRG	1 Kebijakan
			Pelatihan Fasilitator PPRG bagi K/L bidang Infraling	15 orang
	Provinsi yang difasilitasi PUG	Jumlah Provinsi yang difasilitasi PUG	Pendampingan teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke Dalam Dokumen Renja di Provinsi Bidang Infraling	9 Provinsi
			Pendampingan teknis penyusunan Data Terpilah menurut jenis kelamin di Provinsi bidang infraling	2 Provinsi
			Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-undangan yang mendukung PUG dan PPRG	2 kebijakan

			Pelatihan Fasilitator PPRG bagi Provinsi bidang infraling	25 Orang
--	--	--	---	----------

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Asdep KG bidang Infralink terlihat dalam uraian tabel dibawah ini:

Tabel: Capaian Indikator Kinerja Asdep KG Bidang Infralink

No	Indikator Kinerja	Rencana aksi	Output	Outcome
1	K/L bidang Infraling yang terfasilitasi PUG	Pendampingan teknis pengintegrasian gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang Infraling.	15 K/L bidang Infraling didampingi secara teknis untuk melakukan pengintegrasian gender ke dalam dokumen Renja K/L.	Mengintegrasikan gender ke dalam dokumen Renja di 15 K/L bidang Infraling.
		Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang Infraling	15 K/L bidang Infraling didampingi secara teknis untuk meenyusun data terpilah menurut jenis kelamin.	15 K/L bidang Infraling yang didampingi secara teknis menyusun data terpilah menurut jenis kelamin.
		Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	Menyusun produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	Tersedianya produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG
		Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Infraling	Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Infraling.	Tersedianya fasilitator dari lembaga masyarakat yang dipersiapkan untuk mendampingi K/L bidang INfraling yang telah dilatih tentang konsep gender, PUG.
2	Provinsi yang difasilitasi PUG.	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi Bidang Infraling.	9 provinsi dilakukan Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi Bidang Infraling.	9 Provinsi melakukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja provinsi Bidang Infraling
		Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi Bidang Infraling	2 provinsi dilakukan pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi Bidang Infraling.	2 provinsi melakukan penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi Bidang Infraling.
		Penyusunan produk hukum dan perundangan yang	4 provisi Menyusun produk hukum dan perundangan yang	4 provinsi memyusun produk hukum dan perundangan yang

		mendukung PUG/PPRG	mendukung PUG/PPRG	mendukung PUG/PPRG
		Pelatihan fasilitator PPRG bagi provinsi bidang Infraling	15 Orang mengikuti Pelatihan fasilitator PPRG bagi provinsi Bidang Infraling.	15 Orang memahami sebagai fasilitator PPRG bagi provinsi Bidang Infraling.

3. CAPAIAN KINERJA

Indikator 1. Jumlah K/L Bidang Infrastruktur Lingkungan yang terfasilitasi PUG. Output dari indikator 1 adalah 15 K/L bidang Infraling yang difasilitasi PUG.

Tabel : Capaian Kinerja Asdep KG Bidang Infralink

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan PUG di K/L bidang Infraling dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas dan peran perempuan tentang PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	Jumlah K/L bidang Infraling yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	2 K/L	15 K/L	750%

Jumlah K/L Asdep KG bidang Infraling yang menjadi target tahun 2020 sebanyak 2 K/L (Kementerian/Lembaga) yaitu kementerian Kominfo dan LIPI. Alasan pemilihan 2 K/L ini adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2018. Dikarenakan pelembagaan PUG dua K/L tersebut berpotensi untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan Indeks PUG di tahun 2020.

Dalam realisasinya, peningkatan kapasitas PUG/PPRG diberikan kepada semua K/L mitra Asdep KG bidang Infraling sehingga indikator jumlah K/L asdep KG bidang Infraling yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya (Pengarusutamaan Gender/Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender) pada 2020 adalah sebanyak 15 K/L.

Persentase capaian ini sebanyak 750%, yang dibandingkan dengan indikator dalam target awal sebanyak 2 K/L. Peningkatan jumlah target dari semula hanya 2 K/L menjadi 15 K/L tidak lepas dari perubahan pola dan strategi fasilitasi yang semula ditargetkan melalui tatap muka (offline) dengan perubahan dan situasi pandemic COVID-19 yang melanda di Indonesia, maka strategi fasilitasi tersebut berubah menjadi daring (online) sehingga berimbas pada mekanisme pembiayaan yang lebih rendah. Sehingga dana 2 fasilitasi K/L secara offline bisa

membayai 15 K/L secara online. Fasilitasi yang dilakukan secara online diantaranya adalah Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM perencana, Penyusunan GAP dan GBS serta pengolahan data pilah pada K/L.

TARGET K/L	CAPAIAN K/L
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)	1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (KOMINFO)
2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (KOMINFO)	2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	3. LEMBAGA ILMU PENGETAHUN INDONESIA (LIPI)
	4. BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
	5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMEN PUPR)
	6. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA (KLHK)
	7. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
	8. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
	9. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
	10. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KEMEN ESDM).
	11. TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
	12. RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
	13. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KEMEN ATR/BPN)
	14. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (KEMENKO PMK)
	15. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (KEMENSETNEG)

Ada empat kegiatan yang dilakukan Asdep Bidang Infraling untuk mencapai indikator jumlah K/L bidang Infraling yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya. Keempat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen Renja K/L bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan.
2. Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di K/L bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan.
3. Penyusunan produk Hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG.
4. Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan.

Indikator 2. Jumlah daerah (provinsi) yang terfasilitasi PUG Output dari indikator 2 adalah Jumlah daerah (Provinsi) yang difasilitasi PUG.

Tabel: Jumlah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi PUG

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan PUG di K/L bidang Infraling dan beberapa prov/kab/kota serta meningkatnya kapasitas dan peran perempuan tentang PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	Jumlah daerah (provinsi) yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	9 provinsi	8 Provinsi 1 Provinsi sudah mentor	100%

Pada awalnya jumlah provinsi mitra Asdep KG bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan yang menjadi target tahun 2020 adalah 9 provinsi yaitu Sumatera Barat, Maluku, DKI Jakarta, Riau, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Namun dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebelumnya dimana Provinsi Jawa Timur sudah memiliki capaian yang sangat baik (mentor) maka pendampingan dan fasilitasi PUG tahun 2020 difokuskan kepada 8 provinsi lainnya untuk mendorong dan meningkatkan Indeks PUG tahun 2020.

Untuk mencapai Output 2 terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen renja di provinsi.
2. Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi.
Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG dan PPRG di provinsi.
3. Pelatihan fasilitator PPRG bagi Provinsi.

Dari kegiatan dalam indikator 1 dan 2 tersebut menghasilkan capaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman K/L bidang Infrastruktur, IPTEK, dan Lingkungan serta Pemerintah Daerah mitra Asdep KG bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan tentang konsep gender, PUG, data terpilah dan teknis pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan.
2. Penandaan Ganda (double tagging) Anggaran Perubahan Iklim dengan Anggaran Gender;

pada rencana lokus 18 K/L yang menjadi mandat tagging PI;

3. Project Desa Responsif Gender Bidang Penambangan Emas Skala Kecil
4. Penyusunan Pedoman Standarisasi Fasilitator PUG
5. Penyusunan Video Edukasi Perempuan tanggap Bencana
6. Tersedianya fasilitator dari lembaga masyarakat yang dipersiapkan untuk mendampingi K/L dan provinsi mitra bidang infrastruktur, iptek, dan lingkungan yang telah dilatih tentang konsep gender, PUG dan PPRG.
7. Peningkatan Kapasitas SDM di Provinsi dalam rangka mengintegrasikan gender kedalam dokumen perencanaan dan penggarannya melalui pelatihan PPRG dengan metode daring;
8. Penyusunan dokumen policy brief dalam rangka rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan tepat guna

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DI K/L

a. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pendampingan di PUPR lebih bersifat pengawasan dan mitra berbagi, PUPR lebih diikutkan sebagai mitra KL untuk berbagi (sharing best practice) seperti yang dilakukan pada waktu advokasi ke BNPB; - Fasilitasi untuk pendampingan mengikuti bimtek pengisian APE tahun 2020, sehingga dapat dimonitor pelaksanaan di tingkat kementerian; - Mendukung kegiatan yang diadakan secara mandiri dengan media daring, kepada implementasi PUG di tematuk PUPR. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KemenPUPR sebagai KL mentor sudah dapat dijadikan role model dalam pelaksanaan PUG di KL; 2. Kunci suksesnya pada komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender serta peran sekretariat PUG yang intens kepada unit kerja; 3. Dukungan yang diberikan adalah kepada pelaksanaan tematik dan peningkatan jumlah tagging ARG 4. Intervensi di PUPR saat ini diarahkan kepada impelemensi kebijakan keluar yang dihasilkan dan bukan pada penguatan kelembagaan di dalam Strategi pendekatan yang dilakukan saat ini melalui pelibatan Tim PUG PUPR dalam kegiatan bimtek yang dilakukan untuk KL lain 5. Mengawal upaya me-responsif genderkan huntara Sulteng yang saat ini sedang dilakukan melalui kerjasama dengan World Bank

b. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
-----------------------------	-------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pendampingan terhadap Kominfo dilaksanakan dengan metode daring yaitu dengan zoom meeting kegiatan pertama adalah penyusunan data terpilah yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2020, sasaran targetnya adalah para pemangku data dan perencana yang menghasilkan data pilah. - Fasilitasi berikutnya dilakukan yaitu pelatihan/pendampingan integrasi dokumen renja, yaitu dengan melakukan fasilitasi pelatihan GAP/GBS kepada perencana dan unit-unit kerja dilingkup Kemenhub, yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Agustus 2020, target sarannya agar semakin banyak dari KL ini yang paham dengan penyusunan GAP dan GBS, fasilitator yang menangani adalah pak yulius dari LM Pattiro. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenhub masih lemah di 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan (pokja PUG belum terbentuk) serta kurangnya keberadaan SDM terlatih PUG PPRG sementara Komitmen pimpinan setelah advokasi ada peningkatan. 2. Unit penyusunan data terpilah ada di Puslibang namun untuk penyusunan data mereka masih sulit mendapatkan koleksi data pilah dari tiap-tiap unit karena kurangnya komitmen di area ini; 3. Perlunya revitalisasi untuk pelembagaan PUG serta sosialisasi di bidang-bidang, peran Pokja kurang berjalan dengan baik; 4. Sudah ada MoU dengan Kemenhub di tahun lalu, namun menunggu jika ada komitmen lanjutan bagi KemenPPA dengan Kemenhub. 5. Penyusunan MOU antar kementerian terkait PUG 6. Advokasi ke biro perencanaan dan pejabat di eselon I dan II 7. Pembentukan pokja PUG dan pendampingan penyusunan program kerja pokja PUG 8. Penguatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran terkait PUG dan PPRG di masing-masing perwakilan unit eselon I
---	---

c. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (KEMSETNEG)

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan intens dilakukan diawal 2020, dengan luring, asdep KG bidang Infrastruktur dan lingkungan melakukan advokasi langsung ke kemsetneg. - Fasilitasi yang dilakukan di tahun 2020 adalah pendampingan pengisian APE 2020, serta menjelaskan tentang 7 Prasyarat PUG; - Fasilitasi lainnya adalah penyusunan data terpilah di Kemsetneg hal ini dianggap strategis, karena untuk dapat membuka wawasan pemangku kepentingan diperlukan isu-isu gender yang didukung dengan ketersediaan data pilah di kemsetneg, fasilitasi data terpilah dilakukan pada tanggal 15 September 2020, yang hasilnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LIPI masih lemah di 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan (pokja PUG sudah terbentuk dengan SK setmen perlu meningkatkan ke Peraturan menteri) serta kurangnya keberadaan SDM terlatih PUG PPRG sementara Komitmen pimpinan setelah advokasi sangat meningkat. 2. Untuk unit teknis masih perlu dilakukan internalisasi terhadap dampak PUG dalam pelaksanaan tugas sehingga unit kerja (UKE I) merasa terpacu dalam implementasi PUG; 3. Kemsetneg akan melakukan indentifikasi kebutuhan isu PUG di UKE I, Sehingga akan menjadi landasan dalam mengintervensi ke pimpinan unit 4. Pembentukan pokja PUG dan pendampingan penyusunan program kerja pokja PUG 5. Integrasi isu gender dalam materi diklat struktural 6. Penyusunan MOU antar kementerian terkait PUG 7. Advokasi kepada unit kerja serta sosialisasi PUG kepada para pejabat di unit eselon I 8. Integrasi isu gender dalam program dan kegiatan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

hadir dari pejabat di lingkup kemsetneg.	Penguatan kapasitas terkait PUG dan PPRG bagi perencana program dan anggaran di masing-masing perwakilan unit eselon I
--	--

d. BNPB

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pendampingan dengan BNPB diawali dengan advokasi secara luring yang dilakukan oleh asdep KG bidang Infrastruktur dan lingkungan diawal tahun 2020, hal ini belum dilanjutkan dikarenakan kesibukan dari BNPB; - Fasilitasi yang dilakukan yaitu pendampingan pengisian aplikasi APE, yang akan memonitor pelaksanaan APE di BNPB, sehingga menjadi masukan dalam intervensi selanjutnya; - Berikutnya adalah Advokasi dan sosialisasi tentang PUG kepada pemangku kepentingan di BNPB, mengundang best practice dari BNPB dalam rangka benchmarking praktik baik di PUPR bagaimana pelaksanaan PUG di PUPR, hal ini dianggap strategis dalam memacu pejabat di BNPB dalam melaksanakan PUG, kegiatan advokasi dan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020, dengan menghadirkan DR. Yulfitia sebagai narasumber yang menjelaskan manfaat dan fungsi PUG dalam Kebencanaan. - Fasilitasi berikutnya adalah revitalisasi dari PERKA BNPB no 13/2014, hal ini dianggap strategis sebagai komitmen awal dari BNPB dalam mengimplementasikan PUG, serta menurunkan pelaksanaan 7 prasyarat PUG. Pelaksanaan fasilitasi ini dilaksanakan pada tanggal 29 september 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPB masih lemah di 7 prasyarat PUG yaitu Komitmen pimpinan belum terlihat, karena memang belum ada advokasi khusus. 2. Kelembagaan (pokja PUG belum terbentuk) serta kurangnya keberadaan SDM terlatih PUG PPRG sementara. 3. Harus ada advokasi khusus untuk melihat seberapa jauh BNPB paham mengenai PUG serta, kegiatan dan tuisi apa saja yang dilakukan terkait pelayanan 4. Perlu didukung pelaksanaan kelembagaan PUG juga untuk internal BNPB, agar SDM BNPB juga mengerti tentang PUG 5. Secara mandiri akan ada rencana untuk melaksanakan pelatihan PPRG di lingkut unit kerja eselon I

<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari kegiatan ini dibutuhkan sosialisasi dan pemahaman tentang PUG di BNPB secara masif dan berulang sehingga PUG ini dapat menjadi salah satu panduan dalam pelaksanaan tugas di BNPB. 	
---	--

e. KEMENTERIAN ESDM

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan pelaksanaan PUG belum cukup efektif karena counterpart yang ada kurang aktif dalam merespon undangan dan fasilitasi dari KemenPPPA, sehingga fasilitasi yang diberikan berupa pendampingan pengisian aplikasi APE 2020; - Sebagai Kementerian yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan Kemen ESDM dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan perubahan pola pikir terkait EBTE - Sudah banyak kegiatan yang menyinggung terkait perempuan dan energi, bahkan KemenPPPA sudah bekerjasama dalam memfasilitasi Desa Ramah Energi. 	<p>Perlunya advokasi dan sosialisasi secara intens kepada stakeholders di Kemen ESDM sehingga menjadi baik pelaksanaan 7 Prasyarat PUG nya;</p> <p>Fasilitasi yang diberikan harus tepat sasaran mengacu kepada kebutuhan kementerian yaitu bagi pelaksanaan tugas di Kemen ESDM;</p> <p>Fasilitasi untuk komitmen sehingga ada payung hukum untuk pelaksanaan PUG di Kemen ESDM. Penyusunan MOU antar kementerian terkait PUG Advokasi ke biro perencanaan dan pejabat di eselon I dan II.</p> <p>Pembentukan pokja PUG dan pendampingan penyusunan program kerja pokja PUG</p> <p>Penguatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran terkait PUG dan PPRG di masing-masing perwakilan unit eselon I</p> <p>Pendampingan penyusunan data terpilih</p>

f. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>Pelaksanaan Pendampingan terhadap Kominfo dilaksanakan dengan metode daring yaitu dengan zoom meeting kegiatan yaitu advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG di Kementerian Kominfo yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020, dengan menghadirkan Dr. Yulfita Raharjo sebagai narasumber yang menjelaskan tentang Gender, PUG, dan PPRG di Kementerian dan Lembaga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kominfo masih lemah di 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan (pokja PUG belum terbentuk) serta kurangnya keberadaan SDM terlatih PUG dan PPRG sementara Komitmen pimpinan setelah advokasi ada peningkatan. 2. Unit penyusunan data terpilih ada di Puslibang namun untuk penyusunan data mereka masih sulit mendapatkan koleksi data pilah dari tiap-tiap unit karena kurangnya komitmen di area ini; 3. Perlunya revitalisasi untuk pelembagaan PUG serta sosialisasi di bidang-bidang, peran Pokja kurang berjalan dengan baik;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan MOU antar kementerian terkait PUG 5. Advokasi ke biro perencanaan dan pejabat di eselon I dan II 6. Pembentukan pokja PUG dan pendampingan penyusunan program kerja pokja PUG 7. Penguatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran terkait PUG dan PPRG di masing-masing perwakilan unit eselon I
--	--

g. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>Pelaksanaan Pendampingan terhadap LIPI dilaksanakan dengan metode daring yaitu dengan zoom meeting kegiatan yaitu advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG di LIPI yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2020, dengan menghadirkan Dr. Yulfita Raharjo sebagai narasumber yang menjelaskan tentang Gender, PUG, dan PPRG di Kementerian dan Lembaga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LIPI masih lemah di 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan (pokja PUG sudah terbentuk dengan SK setmen perlu meningkatkan ke Peraturan menteri) serta kurangnya keberadaan SDM terlatih PUG PPRG sementara Komitmen pimpinan setelah advokasi sangat meningkat. 2. Untuk unit teknis masih perlu dilakukan internalisasi terhadap dampak PUG dalam pelaksanaan tugas sehingga unit kerja (UKE I) merasa terpacu dalam implementasi PUG; 3. Pembentukan pokja PUG dan pendampingan penyusunan program kerja pokja PUG 4. Integrasi isu gender dalam materi diklat struktural 5. Penyusunan MOU antar kementerian terkait PUG 6. Advokasi kepada unit kerja serta sosialisasi PUG kepada para pejabat di unit eselon I 7. Penguatan kapasitas terkait PUG dan PPRG bagi perencana program dan anggaran di masing-masing perwakilan unit eselon I

h. BAPPENAS

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>Pelaksanaan pendampingan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran Direktorat KPAPD dalam mendorong peningkatan tagging anggaran gender. Serangkaian bimtek dan advokasi gender awareness telah dilaksanakan kepada seluruh Unit Eselon II dengan tujuan mereka dapat melakukan advokasi kepada K/L dalam pendampingan proses perencanaan pembangunan di K/L. Capaian untuk advokasi ini adalah mulai sadarnya Unit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappenas harus tetap dilibatkan dalam setiap upaya advokasi PUG di K/L mengingat fungsi koordinasi yang dimiliki oleh setiap unit eselon II nya 2. Walaupun sebagai instansi driver, masih perlu pendampingan khususnya untuk unit eselon II selain direktorat KPAPD. Perlu strategi pendampingan khusus untuk masing-masing unit eselon II mengingat kesibukan koordinasi yang dilakukan oleh masing masing unit tersebut

<p>Eselon II di Bappenas untuk ikut mengadvokasi perlunya tagging anggaran gender kepada K/L mitra masing-masing. Hal yang sudah kelihatan adalah saat ini sedang digalakkan double tagging antara isu gender dengan isu perubahan iklim. Selain itu, Rakortek tentang Stunting bulan Oktober 2020 juga mengangkat strategi PUG dalam pelaksanaan program prioritas stunting</p> <p>2. Mendorong partisipasi Bappenas dalam advokasi upaya double tagging gender dengan tematik pembangunan yang lain. Saat ini Bidang Lingkungan sedang menargetkan double tagging untuk isu perubahan iklim dan gender bekerjasama dengan Bappenas, BKF Kemenkeu dan UNDP. Capaian untuk advokasi ini adalah double tagging saat ini sudah mulai diperhatikan oleh 85 unit eselon II di seluruh K/L yang melakukan tagging untuk anggaran tematik perubahan iklim</p>	<p>3. Koordinasi yang dilakukan agar melibatkan Direktorat KPAPPO Bappenas</p> <p>4. Perlu memperluas substansi PUG bukan hanya kepada direktorat KPPPO saja namun ke direktorat lainnya sebagai counterpart, sehingga dalam pelaksanaan Trilateral Meeting untuk isu lain PUG dapat masuk dan menjadi pembahasan juga;</p>
--	---

i. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>1. Pendampingan kepada Kemen LHK lebih kepada mendorong agar Kemen LHK semakin melaksanakan strategi PUG untuk program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di Kemen LHK. Capaian dalam hal ini adalah Kemen LHK saat ini sedang gencar melaksanakan strategi PUG dalam isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan dan pengelolaan sampah dan penanganan bahan berbahaya dan beracun. Kemen PPPA saat ini bekerjasama dengan Kemen LHK dan pihak lainnya dalam melakukan PUG di bidang-bidang ini</p> <p>2. Selain didorong untuk mengimplementasikan PUG ke dalam kebijakan dan kegiatan strategis yang dilakukan, Kemen LHK juga didorong untuk mulai melakukan bantuan supervise kepada K/L lain yang menggarap program pembangunan yang beririsan dengan program yang menjadi</p>	<p>1. Komitmen pimpinan tinggi di Kemen LHK sangat tinggi dalam implementasi PUG baik untuk program kegiatan internal maupun untuk program kegiatan yang berhubungan dengan core businessnya. Ini perlu dijaga dan diberikan apresiasi yang tinggi berupa pengakuan dan pelibatan Kemen LHK dalam setiap agenda strategis implementasi PUG di Indonesia</p> <p>2. Meskipun demikian, Biro Perencanaan sebagai Koordinator Pokja PUG tetap harus didorong untuk semakin mendorong unit eselon II di lingkungan Kemen LHK untuk semakin mengimplementasikan PUG pada program kerja masing-masing</p> <p>3. Perlu ditingkatkan kerjasama implementasi PUG pada bidang-bidang tematik yang menjadi Garapan Kemen LHK</p>

<p>tanggungjawab Kemen LHK. Capaian dalam hal ini adalah Kemen LHK saat ini mulai memberikan supervisi dan membantu Kemen PPPA dalam peningkatan pemahaman gender dan PUG kepada 18 K/L yang melakukan tagging anggaran perubahan iklim dan kepada BPPT sebagai mitra untuk project penghapusan merkuri untuk pertambangan emas skala kecil. Dua project tersebut merupakan project yang saat ini sedang dikerjasamakan oleh Kemen LHK, Kemen PPPA, BKF, BPPT dan UNDP</p>	
---	--

j. KEMENKO PMK

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan kepada Kemenko PMK dilakukan dengan cara mendorong keikutsertaan Kemenko PMK dalam kerja kerja mendorong implementasi PUG di K/L 2. Kemenko PMK juga selalu diikuti dalam kegiatan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas PUG yang dilaksanakan bersamaan dengan K/L lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan Kemenko PMK harus lebih diperkuat terutama dalam hal mendorong K/L yang dibawah wewenang koordinasinya untuk lebih mengimplementasikan PUG 2. Strategi advokasi antar pimpinan tinggi perlu dilakukan kepada Kemenko PMK mengingat pentingnya kewenangan dan otoritas yang dimilikinya 3. Perlu ada MoU khusus antara Menteri Koordinator PMK dengan Menteri PPPA baik terkait implemtasi PUG di Kemenko PMK maupun yang terkait dengan promosi dan mendorong K/L dibawah koordinasi Kemenko PMK untuk melaksanakan PUG.

k. KEMEN ATR/BPN

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>Kemen PPPA telah mencoba beberapa kali pendekatan kepad Kemen ATR tetapi belum berhasil dengan baik. Permohonan audiensi dan kerjasama fasilitasi kegiatan terkait gender dan PUG selalu diarahkan kepada unit yang berganti ganti Sudah pernah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG secara khusus tetapi masih sangat perlu dilakukan kegiatan sejenis secara massif dengan mentargetkan pimpinan level tinggi dan menengah Saat ini sedang dicoba untuk advokasi PUG melalui</p>	<p>Advokasi perlu dilakukan untuk level pimpinan tinggi dan menengah Perlu menggandeng LSM yang bergerak dalam isu pertanahan untuk masuk ke dalam ATR/BPN Advokasi berupa tematik pertanahan mungkin akan lebih efektif dibanding advokasi kelembagaan PUG</p>

<p>isu tematik dengan melibatkan K/L lain berupa double tagging anggaran PI dan gender. Selain itu, ada rencana menggandeng LSM yang bergerak di isu pertanahan untuk ikut mengadvokasi Kemen ATR dalam hal PUG</p> <p>Capain saai ini yang bersifat hasil sementara belum ada, baru bersifat proses berupa telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan Kemen ATR</p>	
--	--

I. BMKG

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. BMKG telah diikutsertakan dalam program program peningkatan kapasitas perencana dan auditor terkait PUG dan PPRG yang dilaksanakan dnegan K/L lain 2. Kelembagaan PUG saat ini masih belum ada dan perlu didorong pertemuan antara pimpinan tinggi dan menengah untuk dapat mendirikan kelembagaan PUG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu didorong pertemuan tingkat tinggi antara Pejabat KemenPPPA dengan pejabat BMKG terkait kelembagaan PUG di BMKG 2. Perlu dilakukan identifikasi khusus isu gender dalam tematik meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk lebih memudahkan advokasi gender ke dalam BMKG 3. Sementara advokasi isu gender masih dilakukan dalam tataran kelembagaan dan support untuk ASN perempuan di dalamnya

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DI PROVINSI

a. PROVINSI RIAU

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi yang dilakukan di provinsi riau masih bersifat pendampingan, disamping adanya perubahan dalam strategi pendampingan pelaksanaan fasilitasi PUG juga dirasakan masih agak lambat pergerakannya; - Untuk fasilitasi yang dilaksanakan adalah integrasi dokumen renja, pelatihan GAP dan GBS kepada para perencana di OPD provinsi yang diselenggarakan pada tanggal 25 s.d 26 Agustus 2020, output dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada OPD di provinsi terkait analisis gender dan bagaimana penyusunannya; - Fasilitasi berikutnya adalah penyusunan data pilah di Opd provinsi, yang mana hal ini bermanfaat dalam mengidentifikasi 	<p>Provinsi Riau perlu melakukan penguatan kelembagaan melalui penguatan pokja dan memahami tugas fungsi dan kedudukan dalam pokja, hal ini penting sehingga akan menghasilkan renaksi yang dilaksanakan oleh pokja PUG;</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi lintas OPD khususnya driver yang berperan, sehingga pelaksanaan PUG sesuai dengan renaksi dapat tercapai, hal ini sejalan dengan renaksi yang sudah dibuat;</p> <p>Kendala pengantian SDM pelaksana PUG juga dikeluhkan, maka perlu adanya identifikasi SDM yang sudah memahami sebagai focal poin di OPD tempat ybs bertugas.</p>

<p>isu-isu gender di pemda, dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi berikutnya adalah penyusunan profil gender yang komunikatif sehingga akan menjadi lebih baik lagi dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 	
---	--

b. SULAWESI TENGAH

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PUG di sulteng perlu mendapatkan perhatian disamping wilayah sulteng yang sebagian daerahnya terkena dampak bencana, sulteng juga belum memahami 7 prasyarat PUG secara utuh; - Pendampingan yang dilakukan adalah integrasi dokumen renja berupa pelatihan GAP/GBS kepada perencana OPD yang dilaksanakan 2 hari yaitu pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2020, keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dalam analisis gender khususnya bagi OPD yang melaksanakan pelayanan teknis. Pendampingan lainnya adalah penyusunan profil gender yang informatif bagi provinsi dan kab/kota sehingga dengan materi ini daerah dapat menyajikan profil gender yang berkualitas; - Perlunya pendampingan secara intens kepada prov sulteng agar pemahaman tentang PUG pun meningkat. 	<p>Sulteng harus diberikan motivasi dalam pelaksanaan PUG serta diberikan pelatihan terkait PPRG dan pendampingannya secara intensif, sehingga dalam pelaksanaan tugas analisis gender dapat diterapkan di OPD.</p> <p>Selanjutnya perlu mekanisme yang teratur dalam pelaksanaan Pokja PUG sehingga dalam operasionalnya peran koordinasi lintas OPD semakin terasa.</p> <p>Penguatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran di OPD dan terutama Dinas PPPA terkait PUG dan PPRG (menambah ARG yang tersusun di masing-masing OPD)</p> <p>Penguatan pokja PUG dan pendampingan penyusunan rencana kerja pokja PUG</p> <p>Penguatan lembaga driver PUG</p> <p>Pendampingan dan fasilitasi penggunaan data terpilih</p> <p>Pendampingan PPRG Desa</p>

c. SULAWESI SELATAN

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan yang dilakukan adalah mengikutkan sulsel dalam fasilitasi pengisian APE bersama Kab/Kota sehingga dapat diperjelas bagaimana pengisian tersebut dapat menjadi langkah strategis, - Selain itu Sulsel juga mengikuti kegiatan penyusunan Profil gender yang informatif dengan fasilitasi dari 	<p>Sulsel membutuhkan penguatan lagi dipendamping dan fasilitator walau sudah mentor namun perlu kiranya agar ada penguatan yang terstruktur sehingga pelaksanaan PUG dapat dirasakan oleh OPD lainnya;</p> <p>Sulsel juga telah mendorong kab/kota untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG dengan mengisi monitoring evaluasi APE, komitmen yang lain adalah dengan pelaksanaan PPRG desa di beberapa lokus tempat yang sudah ditetapkan.</p>

KemenPPPA dengan pemateri ibu Dati Fatima pada tanggal 30 September 2020.	<p>Penguatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran di OPD dan terutama Dinas PPPA terkait PUG dan PPRG (menambah ARG yang tersusun di masing-masing OPD)</p> <p>Penguatan pokja PUG dan pendampingan penyusunan rencana kerja pokja PUG</p> <p>Penguatan lembaga driver PUG</p> <p>Pendampingan dan fasilitasi penggunaan data terpilah</p>
---	---

d. PROVINSI SUMATERA BARAT

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi yang dilakukan di provinsi Sumatera Barat masih bersifat pendampingan, disamping adanya perubahan dalam strategi pendampingan pelaksanaan fasilitasi PUG juga dirasakan masih agak lambat pergerakannya; - Untuk fasilitasi yang dilaksanakan adalah integrasi dokumen renja, pelatihan GAP dan GBS kepada para perencana di OPD provinsi yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2020, output dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada OPD di provinsi terkait analisis gender dan bagaimana penyusunannya; - Fasilitasi berikutnya adalah penyusunan data pilah di Opd provinsi, yang mana hal ini bermanfaat dalam mengidentifikasi isu-isu gender di pemda, dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020; - Fasilitasi berikutnya adalah penyusunan produk hokum di daerah yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 	<p>Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan penguatan pelembagaan melalui penguatan pokja dan memahami tugas fungsi dan kedudukan dalam pokja, hal ini penting sehingga akan menghasilkan renaksi yang dilaksanakan oleh pokja PUG;</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi lintas OPD khususnya driver yang berperan, sehingga pelaksanaan PUG sesuai dengan renaksi dapat tercapai, hal ini sejalan dengan renaksi yang sudah dibuat;</p> <p>Kendala pengantian SDM pelaksana PUG juga dikeluhkan, maka perlu adanya identifikasi SDM yang sudah memahami sebagai focal poin di OPD tempat ybs bertugas.</p>

e. MALUKU

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi yang dilakukan di provinsi Maluku masih bersifat pendampingan, disamping adanya perubahan dalam strategi pendampingan pelaksanaan fasilitasi PUG juga dirasakan masih agak 	<p>Maluku harus diberikan motivasi dalam pelaksanaan PUG serta diberikan pelatihan terkait PPRG dan pendampingannya secara intensif, sehingga dalam pelaksanaan tugas analisis gender dapat diterapkan di OPD.</p>

<p>lambat pergerakannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk fasilitasi yang dilaksanakan adalah integrasi dokumen renja, pelatihan GAP dan GBS kepada para perencana di OPD provinsi yang diselenggarakan pada tanggal 10 s.d 12 Maret 2020, output dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada OPD di provinsi terkait analisis gender dan bagaimana penyusunannya; - Fasilitasi berikutnya adalah penyusunan data pilah di OPD provinsi, yang mana hal ini bermanfaat dalam mengidentifikasi isu-isu gender di pemda, dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 	<p>Selanjutnya perlu mekanisme yang teratur dalam pelaksanaan Pokja PUG sehingga dalam operasionalnya peran koordinasi lintas OPD semakin terasa.</p>
--	---

f. PROVINSI DKI JAKARTA

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikarenakan kelembagaan APE yang sudah relative baik, pendampingan ke DKI diarahkan untuk integrasi gender ke dalam program dan kebijakan yang menjadi inti tugas dan fungsi OPD dan sudin 2. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam analisis gender telah dilaksanakan. Capaian dari kegiatan ini adalah para ASN di lingkungan OPD dan Sudin di Propinsi DKI Jakarta saat ini telah mulai terbuka dengan isu gender dan secara gradual sedang dalam tahap implementasi PUG di organisasi masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilaksanakan pendampingan khusus tentang cara menganalisis isu gender di sektor sektor khusus pemerintahan untuk lebihmeningkatkan kualitas kegiatan responsive gender yang sudah dilaksanakan 2. Implementasi isu gender juga agar lebih diarahkan kepada sektor pembangunan yang menjadi business core dari OPD dan tidak hanya terkait dukungan manajemen dan penyediaan fasilitas khusus perempuan dan anak 3. Perlu didorong kerjasama dengan LSM dan perguruan tinggi maupun pihak swasta dalam implementasi PUG. Integrasi PUG dalam tematik pembangunan mungkin akan menghasilkan hasil yang optimal selain pendampingan penguatan kelembagaan PUG

g. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan pendampingan telah dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan bimbingan teknis. Capaian dari hal ini adalah OPD yang menangani pengembangan kapasitas kepegawaian saat ini telah memasukan peningkatan kapasitas dalam isu gender sebagai salah satu agenda rutin pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu monitoring dan tindak lanjut dari penegmbangan Model PPRG Desa sehingga isu gender tidak hanya termainstream dalam RPJMDes tetapi juga dilaksanakan secara penuh di Kalimantan Selatan 2. Komunikasi yang telah terjalin dnegan baik antar stakeholder's agar terus dipertahankan dan dikuatkan

<p>yang dilakukan kepada para ASN di lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>2. Kalimantan Selatan saat ini juga merupakan satu dari sedikit Propinsi yang memiliki Desa Model PPRG Desa. Desa Model ini memiliki focus tematik lingkungan dan berada di Kab. Tapin. Komitmen pimpinan daerah terhadap pelaksanaan Desa Model ini sangat baik dimana Bupati langsung mengawal dan memantau implementasi Desa Model ini</p> <p>3. Pengembangan Model PPRG Desa sudah mengintegrasikan gender ke dalam RPJMDes</p>	<p>3. Pelembagana PUG di tingkat Propinsi agar terus dikuatkan utamanya untuk OPD OPD yang menangani langsung isu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.</p>
--	---

h. PAPUA

Pendampingan yang dilakukan	Rekomendasi dan Catatan
<p>1. Sebelum ada pandemic covid19, Propinsi Papua memperoleh pendampingan khusus dimana alokasi kegiatan yang dilakukan dilaksanakan melebihi dari rata rata jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk propinsi lain. Setelah covid19 melanda, pendampingan ini menemui kendala berupa rendahnya kualitas infrastruktur jaringan internet yang menjadi alat utama dalam pendampingan</p> <p>2. Pendampingan dilakukan baik untuk meningkatkan kelembagaan PUG maupun untuk implementasi PUG pada sektor sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi perempuan</p>	<p>1. Perlu didorong pendekatan antar pimpinan tinggi terkait advokasi PUG di Propinsi Papua selain juga keterlibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi dan swasta dalam penguatan kelembagaan dan implementasi PUG dalam sektor pembangunan</p> <p>2. Perlu dirumuskan strategi khusus pelaksanaan pendampingan di Propinsi Papua mengingat infrastruktur jaringan internet yang relative masih kurang</p>

PENANDAAN GANDA (DOUBLE TAGGING) ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM DENGAN ANGGARAN GENDER

Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Sustainable Development Finance, kerjasama antara Pemerintah RI dengan UNDP. Project Penandaan Ganda dikerjakan oleh BKF Kemenkeu, Bappenas, Kemen PPPA dan UNDP dan bertujuan untuk mendorong co-benefits antara anggaran yang ditagging dibawah isu perubahan iklim dengan anggaran yang ditagging di bawah isu gender.

Hasil dari Project adalah kajian bersama dengan Pattiro tentang pendanaan perubahan iklim yang responsive gender, yang dilakukan pada 5 (lima) K/L yang melakukan tagging Pi dan tagging gender. Hasil dari kajian tersebut adalah besarnya jumlah anggaran PI dan sedikitnya jumlah anggaran gender dan minimnya jumlah dan nominal anggaran yang ditagging kombinasi antara PI dan Gender.

Bidang Lingkungan KemenPPPA telah berkontribusi dalam peningkatan kapasitas analisis gender kepada 85 unit eselon II di 18 K/L yang melakukan tagging anggaran perubahan iklim. Peningkatan kapasitas itu berupa sosialisasi dan advokasi isu gender, pelatihan analisis GAP dan GBS, pelatihan data terpilah gender dan pembentukan forum data gender. Bidang lingkungan akan dan harus terus mengawal project ini mengingat nilai strategis yang ada di dalamnya. Saat ini project dalam proses rekrutmen untuk konsultan yang akan melihat peluang dibuatnya modul dan petunjuk teknis pelaksanaan double tagging ini. Peran Kemen PPPA sangat sentral dalam project ini. Kolaborasi dan kerjasama yang erat antar pihak dalam Project ini juga telah berkontribusi terhadap pencapaian Gender Gold Seal bagi UNDP Indonesia, Gender Gold Seal merupakan pencapaian tertinggi yang diberikan Kantor Pusat UNDP terhadap Kantor UNDP di seluruh dunia dalam implementasi gender dan kerjasama dengan national gender machinery. Kantor UNDP Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan UNDP di Kawasan Asia dan Pasifik yang saat ini memperoleh seal ini.

PROJECT DESA RESPONSIF GENDER BIDANG PENAMBANGAN EMAS SKALA KECIL

Project ini merupakan upaya intervensi integrasi gender Bidang Lingkungan terhadap Project Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Penambangan Emas Skala Kecil (PESK). PESK dilaksanakan oleh Kemen LHK dan BPPT bekerjasama dengan Gold ISMIA UNDP. Tujuan project ini adalah untuk mendirikan modelling integrasi isu gender ke dalam program PESK yang dilakukan. Output besar project ini nantinya adalah diterbitkannya kebijakan dan atau modul integrasi gender pada bidang PESK serta terlaksananya Desa Responsif Gender Bidang PESK.

Sejak awal inisiasi Desa responsive Gender Bidang PESK, KemenPPPA terlibat sangat aktif. KemenPPPA lah yang mengusulkan desa lokus dan menghubungkan jejaring baik di tingkat Kab/Kota maupun Propinsi. KemenPPPA juga mendorong kesiapan project Desa Responsif Gender Bidang PESK ini melalui advokasi kepada pimpinan daerah baik di Propinsi Riau

maupun Kab. Kuantan Singingi sehingga mereka mengalokasikan kegiatan khusus untuk seluruh Kepala Desa berupa advokasi gender dan pelatihan GAP dan GBS. Saat ini project Desa Responsif Gender bidang PSK sedang dalam tahap proses rekrutmen konsultan yang nantinya akan mengerjakan beberapa tugas yang telah disetujui oleh tim di Jakarta (Kemen LHK, BPPT, Kemen PPPA dan UNDP), tim di Riau (Bappeda, Dinas PPPA, Dinas LH dan Dinas ESDM) dan tim di Kab Kuantan Singingi (Bappeda, Dinas PPPA dan Seluruh OPD yang terlibat). Berdasarkan kesepakatan tim, target capaian Desa Responsive Gender Bidang PESK untuk tahun 2021 adalah (1) terbitnya SK Bupati tentang pemilihan lokus desa beserta tugas dan wewenang masing-masing OPD, (2) terbitnya Perdes tentang PUG, (3) terbitnya Perkades tentang PUG dalam PESK, (4) terbitnya RPJMDes yang responsive Gender dan (5) dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas project. Kerjasama yang erat antara Kemen PPPA dengan stakeholder juga telah membuat project ini menjadi salah satu factor penentu bagi tercapaian Gender Gold Seal oleh UNDP Indonesia

PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI FASILITATOR PUG

Untuk dapat mendampingi baik ditingkat pusat dan daerah dibutuhkan pendamping lapangan atau lebih dikenal sebagai fasilitator PUG, dengan banyaknya permintanya fasilitasi pendampingan PUG maka dirasa tidak mungkin bahwa pelaksanaan pendampingan ditanggung kemenPPPA saja, maka dibutuhkan jejeraing dan peran serta lembaga masyarakat mitra pembangunan dalam pendampingan ini.

Dengan tingkat kualitas dari SDM dari fasilitator maka dibutuhkan acuan baku secara teknis meletakkan fondasi nilai dalam pelaksanaan fasilitasi dalam bentuk pedoman standarisasi fasilitator PUG, yang meletakkan dasar-dasar kualitas PUG, penyusunan ini menggandeng ibu Yurni Satria sebagai salah satu Mentor PUG

PENYUSUNAN VIDEO EDUKASI PEREMPUAN TANGGAP BENCANA

Indonesia berada dalam kondisi rawan bencana yang terjadi tidak mengenal waktu dan tempat. Peran perempuan sebagai salah satu agen kesiapsiagaan bencana menjadi potensi yang strategis, sehingga dibutuhkan alat media pembelajaran untuk memberikan dan pemahaman terkait peran serta perempuan dalam kesiapsiagaan bencana, baik itu saat pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Media komunikasi dan edukasi ini disusun

dalam bentuk 2 seri video animasi yang di dalamnya terdapat cerita serta pesan yang berkesinambungan baik bagi pemangku kebijakan dan masyarakat luas.

PELATIHAN FASILITATOR DARI LEMBAGA MASYARAKAT YANG DIPERSIAPKAN UNTUK MENDAMPINGI K/L BIDANG INFRASTRUKTUR, IPTEK, DAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILATIH TENTANG KONSEP GENDER, PUG DAN PPRG

Dalam rangka mempersiapkan pendamping bagi K/L dalam memfasilitasi isu terkait PPRG, Deputi Bidang Kesetaraan Gender melatih calon fasilitator terutama yang berasal dari Lembaga Masyarakat dalam bidang PPRG yang telah bermitra dengan Kemen PPPA selama ini seperti Fitra, Pattiro dan MDS (Mitra Daya Setara). Asdep KG Bidang Infraling telah melatih 16 calon fasilitator PPRG tingkat pusat yang berasal dari Lembaga Masyarakat mitra Kemen PPPA terkait PPRG yaitu Pattiro, Fitra dan MDS.

4. REALIASI ANGGARAN

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Asdep Bidang Infraling	1.670.783.000	1.665.264.457	99,07%	15.518.543

Anggaran Asdep Bidang Infraling sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana kerja Asdep Bidang Infraling adalah sebesar dua miliar tujuh ratus juta rupiah (Rp 2.700.000.000,00). Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi satu miliar, enam ratus tujuh puluh juta, tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah (Rp 1.670.783.000,00). Realisasi anggaran atau serapan anggaran mencapai 99,07% atau sebanyak satu miliar enam ratus enam puluh lima juta, dua ratus enam puluh empat ribu, empat ratus lima puluh tujuh rupiah (Rp 1.665.264.457,00).

Anggaran Asdep Bidang Infraling 2020 digunakan untuk membiaya kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Pendampingan teknis Pengintegrasian Perspektif Gender ke dalam Renja K/L Bidang Infraling	270.813.000	Indikator1/Output 1
2	Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin	22,400.000	Indikator1/Output 1

	di K/L bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan		
3	Penyusunan produk Hukum dan perundangan yang mendukung PUG/PPRG	49.900.00	Indikator1/Output 1
4	Pelatihan fasilitator PPRG bagi K/L bidang Infrastruktur, Iptek, dan Lingkungan	32.210.000	Indikator1/Output 1
5	Pendampingan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen renja di provinsi	1.056.191.457	Indikator2/Output2
6	Pendampingan teknis penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin di provinsi	14.300.000	Indikator2/Output2
7	Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung PUG dan PPRG di provinsi	7.400.000	Indikator2/Output2
8	Pelatihan fasilitator PPRG bagi Provinsi	202.050.000	Indikator2/Output2

5. HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai kinerja Asdep KG Bidang Infraling utamanya disebabkan karena pandemi covid-19 yang tiba-tiba melanda dunia sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2020.

Wabah covid-19 yang menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlalu berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah di tingkat pusat (K/L) dan daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten) sebagai target utama seperti kegiatan-kegiatan fasilitasi PUG dan PPRG bagi pemerintah pusat dan daerah. Namun wabah covid-19 ini menjadi kendala pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung sebagai target kegiatan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan metode pendampingan yang sebagian besar dilakukan secara online (daring) sehingga memberi tantangan pada tingkat konsentrasi peserta yang menjadi kurang fokus dalam mengikuti kegiatan;
2. Perubahan metode pelatihan dari tatap-muka secara langsung menjadi online berdampak pada jumlah anggaran yang menjadi jauh lebih kecil. Usulan perubahan pendekatan pelatihan seperti yang diusulkan pada poin 3, yaitu khusus

melakukan penguatan kepada fasilitator yang dilakukan secara online, dampaknya berdampak sisa anggaran berlebih pada tahun 2020. Hal ini dapat disiasati dengan menambah jumlah fasilitator yang akan dilatih pada tahun 2020 dengan jumlah target fasilitator yang akan dilatih tahun 2021.

3. Efektifitas pelaksanaan pertemuan secara Daring yang memiliki durasi waktu kurang maksimal, karena efektif pertemuan dilakukan sekitar 2 s.d 3 jam dengan keterlibatan dari semua peserta, untuk pertemuan pelatihan bimtek dan pendampingan karena materi yang disampaikan cukup padat sehingga keterlibatan dari peserta kurang terpantau, maka dibutuhkan strategi pendekatan lain dalam mekanisme intervensi selain pertemuan online;
4. Tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki sinyal internet yang baik dan memadai sehingga efektifitas keikutsertaan juga menjadi salah satu isu penting dalam pertemuan online.

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

E. SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Kesetaraan Gender. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sesdep Deputy KG menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat koordinatif di lingkungan Deputy KG seperti pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

1. RENCANA AKSI

Pelaksanaan Kinerja di lingkungan Sesdep Bidang KG didasarkan Perjanjian Kerja atau PK antara pengemban jabatan Sesdep dengan Deputy Bidang KG pada Januari 2020. Dalam PK

tersebut, sasaran program/kegiatan adalah meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy Bidang Kesetaraan Gender. Untuk mengukur capaian dari sasaran tersebut terdapat dua indikator, dua output dan target pencapaian yaitu:

Indikator 1: Persentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar. Output dari indikator satu adalah Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, dengan target 100 persen

Indikator 2: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputy Bidang Kesetaraan Gender. Output dari indikator dua adalah Layanan Saranan dan Prasarana Internal dengan target 100 persen.

Dari dua indikator dan dua oput kemudian diturunkan ke dalam sejumlah rencana aksi seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Sasaran	Indikator Kinerja	Output	Rencana Aksi	Target
Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Persentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	Layanan Dukungan Manajemen Eselon1		100% (1 Layanan)
			Penyusunan rencana program, dan penyusunan rencana anggaran	100% (1 Dokumen)
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	100% (1Dokumen)
			Pengelolaan data dan informasi	100% (1 layanan)
			Pengeloaan keuangan	100% (1 laporan)
			Pengelolaan perbendaharaan	100% (1 Layanan)
			Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	100% (1 layanan)
			Pengelolaan kepegawaian	100% (1 layanan)
			Pelayanan umum dan perlengkapan	100% (1 layanan)

			Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	100% (1 layanan)
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang KG.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	100%

2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pada semua indikator adalah 100 persesn. Semua kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi bejalan sesuai dengan rencana dan outputnya.

3. REALISASI ANGGARAN

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender	5.966.189.000	5.964.953.845	99,97 %	1.235.155 (0,03%)

Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender atau Sesdep Deputi KG, sesuai dengan PK yang ditandatangani pada Januari 2020 dan juga tertuang dalam rencana kerja Sesdep Bidang KG adalah sebesar tujuh miliar lima ratus juta rupiah (Rp 7.500.000.000,00). Tetapi karena terjadi wabah covid-19, maka dilakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi Lima miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta, seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah (Rp 5.966.189.000,00). Realisasi anggaran atau serapan anggaran mencapai 99,97% atau sebanyak lima miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta, serratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah (Rp 5.966,189,000,00). Sisa anggaran sebesar satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah (Rp 1.235.155,00) atau 0,03% dari pagu.

Anggaran Sesdep KG 2020 digunakan untuk membiaya sepuluh kegiatan kegiatan dengan rincian sembilan kegiatan untuk mencapai indikator satu dan output satu serta satu kegiatan

untuk mencapai indikator dua dan ouput dua. Dibawah ini disajikan table ke sepuluh kegiatan anggaran dan pembiayaan dari tiap kegiatan.

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	24.997.000	Indikator1/Output1
2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	673.255.000	Indikator1/Output1
3	Pengelolaan data dan informasi	254.600.000	Indikator1/Output1
4	Pengelolaan keuangan	1.113.297.700	Indikator 1/output1
5	Pengelolaan perbendaharaan	213.488.400	Indikator 1/Output1
6	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	3.750.000	Indikator1/Output1
7	Pengelolaan Kepegawaian	22.196.500	Indikator1/Output1
8	Pelayanan umum dan perlengkapan	1.575.257.905	Indikator1/Output1
9	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1.159.570.840	Indikator1/Output1
10	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	924.539.100	Indikator2/Output2
	Jumlah	5.964.953.845	1.235.155 (sisa anggaran)

Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender selain Layanan dukungan administrasi, juga layanan dukungan terhadap pelaksanaan substansi di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	CAPAIAN
1	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran di tahun berjalan: menyikapi perubahan kebijakan keuangan dan perencanaan, seperti koordinasi revisi sasaran dan target kegiatan terkait kebijakan refocusing dampak dari pandemi covid-19, koordinasi revisi kegiatan terkait prioritas kegiatan di Kedeputian Kesetaraan Gender serta penyesuaian-penyesuaian prosedur maupun struktur anggaran terkait kebijakan/peraturan nasional dari Kementerian Keuangan ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2021 : 	<p>Tersedianya Dokumen Revisi Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>Tersedianya Dokumen Renja 2021</p>

		Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian PPA dan Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, maka dilakukan revisi terhadap Permen PPPA No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA. Oleh karena itu satker Deputy Bidang Kesetaraan Gender, sebagaimana yang dilakukan satker yang lain, melakukan analisis untuk penajaman terhadap rumusan indikator program dan kegiatan di lingkup kerjanya, yang akan tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Satker Deputy Bidang KG Tahun 2021.	
2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	<p>a) Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi PUG : Dalam rangka mendukung Evaluasi pelaksanaan PUG secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah secara online, dilakukan pengembangan dan perbaikan terhadap aplikasi evaluasi pug bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk menyesuaikan dengan revisi questioner indikator pemantauan dan evaluasi.</p> <p>b) Fasilitasi Penataan kearsipan di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender : Penataan kearsipan menjadi salah satu kegiatan prioritas di Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender, dan mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019</p> <p>c) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender</p> <p>d) Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan PUG secara online: Menyikapi perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi metode online, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuain terkait kegiatan pelatihan ataupun sosialisasi yang dilakukan secara daring di Deputy Bidang Kesetaraan Gender. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai hasil evaluasi, telah dilakukan penyusunan modul pelatihan online bekerjasama dengan Pakar Gender</p> <p>e) Fasilitasi dukungan pemberian bantuan spesifik perempuan:</p>	<p>Terlaksananya pengembangan aplikasi evaluasi pug yang dapat diakses melalui website www.kemenpppa.go.id</p> <p>Terlaksananya penataan kearsipan untuk arsip keuangan di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender</p> <p>Tersedianya Lakip Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020</p> <p>Tersedianya modul Pelatihan PUG/PPRG Online</p> <p>Terlaksananya pemberian bantuan</p>

		<p>Pandemi covid-19 telah berimbas pada kemampuan ekonomi di banyak keluarga. Sebagai bentuk dukungan kepada perempuan dan anak, Kemen PPPA berkomitmen untuk memberikan bantuan spesifik perempuan yang dilaksanakan sesuai Keputusan Sekretaris Kemen PPPA No. 121 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lainnya yang Meliputi Pemberdayaan Perempuan Pemenuha Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.</p>	<p>spesifik perempuan di Provinsi Banten</p>
		<p>f) Fasilitas Pelaksanaan Program Bidang Kesetaraan Gender: Pemberian penghargaan APE merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang berkomitmen melaksanakan PUG/PPRG secara sistematis. Penilaian akhir bagi calon penerima penghargaan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data penilaian mandiri yang masuk dalam aplikasi https://evaluasipug.kemenpppa.go.id/. Berkaitan dengan hal tersebut selain dukungan terhadap pengembangan aplikasi, dilakukan juga koordinasi untuk menetapkan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan verifikasi terhadap evaluasi pug di K/L dan Pemda.</p>	<p>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan verifikasi data evaluasi pug di K/L dan Pemda</p>
3	Pengelolaan data dan informasi	<p>a) Fasilitas Bimtek Pengumpulan data dan Informasi (tatacara pengisi eSmart dan eMonev)</p>	<p>Terlaksananya bimbingan teknis pengumpulan data dan informasi bagi penanggung jawab data dan pelaporan di lingkup Deputi Bidang Kesetaraan Gender</p>
		<p>b) Fasilitas penyediaan e-learning: Dalam rangka percepatan peningkatan pemahaman terkait PUG/PPRG bagi internal Kemen PPPA dan para stakeholder, maka Deputi Bidang Kesetaraan Gender bekerjasama dengan pihak ke 3 dalam penyediaan aplikasi e-learning gender dan penyusunan materi e-learning gender dalam bentuk modul-</p>	<p>Tersedianya aplikasi e-learning gender dan modul e-learning gender</p>

		modul yang memuat pengetahuan mengenai PUG dan PPRG.	
4	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	a) Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Satker: Sesuai fungsinya, Sekretariat Deputi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Tercapainya nilai IKPA Satker Deputi KG diakhir tahun anggaran 2020 sebesar 95
		b) Layanan pemberian Gaji dan honor operasional satuan kerja	a) Terlaksananya pemberian gaji bagi 14 orang Tenaga Non ASN, 6 orang pengemudi dan 1 orang pramusaji b) Terlaksananya dukungan operasional satker
		c) Pemeliharaan dan update aplikasi Keuangan Siska	Tersedianya aplikasi keuangan Siska versi terbaru
5.	Pengelolaan Kepegawaian	Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Kesetaraan Gender: a) Fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai Kemen PPPA terkait gender b) Refocusing anggaran berdampak pada alokasi anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM dalam hal budaya kerja, rencana pelatihan Tim Building yang semula akan diselenggarakan terpaksa dibatalkan karena bertepatan dengan dimulainya peningkatan penyebaran covid-19 yang diikuti dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). c) Menyikapi Kebijakan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Permenpan No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, dilakukan sosialisasi dan internalisasi secara kontinyu mengenai Jabatan Fungsional kepada para pejabat administrasi di lingkup Deputi Bidang KG, dengan pertemuan-pertemuan daring.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi 38 orang pegawai Deputi Bidang Kesetaraan Gender
6	Pelayanan umum dan perlengkapan	a) Layanan penyediaan Keperluan sehari-hari Perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kesekretariatan: Penyediaan dukungan keperluan perkantoran bagi keasdepan (ATK dan Bahan Habis Pakai), biaya pemeliharaan sarana operasional kantor seperti	Tersedianya layanan sarana dan prasarana operasional

		<p>computer, laptop, printer dan mesin fotocopy, sewa kendaraan dinas Pejabat Pimpinan Tinggi serta penyediaan bahan bakar bagi kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional sekretariat.</p>	
		<p>b) Fasilitas Penanganan COVID-19 : Dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di internal satker Deputy Bidang Kesetaraan Gender dan dukungan terhadap perubahan metode dalam bekerja, maka dilakukan alokasi anggaran bagi penyediaan dukungan bagi kesehatan pegawai, seperti penyediaan vitamin dan suplemen serta makanan/minuman bergizi, serta fasilitas rapid test antibody, test PCR bagi beberapa pegawai yang terkonfirmasi kontak erat dan penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi pegawai yang positif dan tidak dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu diberikan juga bantuan pembelian pulsa bagi pegawai, sebagai sarana bagi pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan secara daring</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pemberian dukungan penambah daya tahan tubuh bagi pegawai Deputy Bidang ▪ Terlaksananya dukungan test covid-19 bagi pegawai Deputy KG ▪ Terlaksananya pemberian bantuan pulsa bagi pegawai Dep Bidang KG
7	Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	<p>a) Fasilitas koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Satker Deputy Bidang Kesetaraan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pertemuan pokja 8 Area di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya koordinasi pelaksanaan RB di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penyelenggaraan Workshop Budaya Pelayanan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersosialisasinya budaya pelayanan prima di internal Deputy Bidang KG
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Resiko di lingkup Deputy Bidang Kesetaraan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya rencana rencana pelaksanaan manajemen resiko Dep Bidang KG
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pembuatan media promosi pelaksanaan Zona Integritas di Dep KG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya video promosi pelaksanaan ZI di Dep Bidang KG
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender dilaksanakan Revisi Penyusunan Indikator Pemantauan dan Evaluasi PUG untuk menyusun Indeks PUG Nasional, K/L dan Pemda yang menjadi indikator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya revisi indikator pemantauan dan evaluasi pug ▪ Tersedianya laporan perhitungan Indeks PUG

		kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi dalam rangka meningkatkan layanan penyediaan narasumber yang merupakan 1 dari 4 layanan yang disediakan, Deputy Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan kegiatan Refreshing bagi Fasilitator Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya 10 orang Fasilitator Nasional PUG/PPRG
		<p>b) Fasilitasi Promosi Strategi Kebijakan Kesetaraan Gender melalui Peringatan Hari Ibu ke-92:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada tahun 2020, Deputy Bidang Kesetaraan Gender menjadi penyelenggara Peringatan Hari Ibu ke-92 ▪ Menyesuaikan kondisi pandemic covid-19, peringatan Hari Ibu ke-92 diselenggarakan dengan lebih sederhana dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ▪ Rangkaian Kegiatan PHI yang didukung oleh Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender antara lain berupa webinar; pembuatan media KIE (video makna PHI bagi millennial dan video sejarah PHI); pemberian bantuan sosial bagi pejuang perempuan di DKI Jakarta dan Jawa Barat; ziarah ke TMP Kalibata; pembuatan video profile penerima penghargaan bagi perempuan inisiator di 34 provinsi yang berkiprah di 12 BPfA; penyelenggaraan bazar virtual bagi pelaku wirausaha perempuan usaha mikro dan industri rumahan; dan penyelenggaraan Acara Puncak 	Terlaksananya promosi strategi kebijakan kesetaraan gender melalui Peringatan Hari Ibu ke-92
8	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Menyikapi perubahan metode dalam bekerja, dimana sebagian besar dilakukan dengan metode online, maka diperlukan dukungan sarana yang dapat digunakan bekerja dari mana saja (flexible working place) berupa penyediaan laptop bagi pegawai Dep KG</p>	Tersedianya sarana dukungan pelaksanaan bekerja secara online

BAB IV : PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA tahun 2020 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah dituangkan kedalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Secara umum pada tahun 2020 Deputy Bidang Kesetaraan Gender telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari program dan kegiatan Deputy Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020 telah dilaksanakan dengan pencapaian yang baik dengan melihat pencapaian realisasi keuangan sebesar 99.34 persen dan realisasi kinerja melebihi 100 persen.

Situasi pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 hingga akhir tahun 2020, cukup memberi tantangan bagi pencapaian dan pelaksanaan target kinerja yang dilaknakan oleh Deputy Bidang Kesetaraan Gender, dimana moda kerja, mekanisme koordinasi di K/L dan daerah mengalami beberapa perubahan pola dan penyesuaian dari tatap muka langsung menjadi pertemuan daring. Secara kualitas tentu saja harus tetap menjadi perhatian untuk melihat seberapa jauh capaian kinerja yang telah dilaksanakan memberi kontribusi dalam pencapaian sekaligus peningkatan IPG dan IDG di Indonesia.

Pandemi COVID-19 mungkin masih terus terjadi hingga tahun 2021, dan situasi tahun 2020 dimungkinkan menjadi pembelajaran dari proses-proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Kesetaraan Gender, sehingga dibutuhkan antisipasi dan inovasi yang lebih strategis untuk terus bisa mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender di Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Dan satu pekerjaan yang masih harus diselesaikan di tahun 2021 adalah penyelesaian verifikasi penilaian APE yang menjadi kegiatan lanjutan dari tahun 2020.